



VOLUME XIII / NO. 131 / AGUSTUS 2018

MEDIAKEUANGAN

TRANSPARANSI INFORMASI KEBIJAKAN FISKAL

TUAN RUMAH SIAP BERLAGA

Sejumlah sarana dan infrastruktur pendukung Asian Games selesai dibangun. Selain berdaya guna dalam jangka panjang, persiapan dan pelaksanaan Asian Games bisa memberi stimulus bagi perekonomian



Daftar Isi



5 DARI LAPANGAN BANTENG

6 EKSPOSUR

10 LINTAS PERISTIWA

LAPORAN UTAMA

- 15 Bersiap Sambut Perhelatan
- 18 Infografis
- 20 Dulang Prestasi Optimalkan Ekonomi
- 23 Asian Games Mengubah Indonesia
- 25 Asian Games dan Dampaknya bagi Indonesia

WAWANCARA

- 27 Voyage to Indonesia: Pembangunan Manusia dan Fintech

POTRET KANTOR

- 30 Terus Berinovasi Dalam Semangat Transformasi

FIGUR

- 32 Yang Muda Yang Berkarya

EKONOMI TERKINI

- 36 Bauran Kebijakan Menjadi Alat Penting

KOLOM EKONOM

- 40 Menata Ulang Sistem Perpajakan Global

GENERASI EMAS

- 44 Pembuktian Menggugah di Titik Nadir

OPINI

- 46 Menilik Sistem Perbendaharaan yang Ideal

REGULASI

- 48 Percepat Proses, Pagu Kontrak Tahun Jamak Ditambah

INSPIRASI

- 50 Menebar Buku Hingga Penjuru

RENUNGAN

- 52 Menjemput Sukses dengan Passion

FILM

- 53 Kulari Ke Pantai: Road Trip ala Anak-Anak

JALAN-JALAN

- 54 Daya Pikat Sendang Pinilih

SELEBRITI

- 56 Mimpi Manis Sang Harpis

Diterbitkan oleh: Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. **Pelindung:** Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. **Pengarah:** Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo. **Penanggung Jawab:** Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto. **Pemimpin Umum:** Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Nufransa Wira Sakti. **Pemimpin Redaksi:** Kabag Manajemen Publikasi, Rahmat Widiana. **Redaktur Pelaksana:** Dianita Suliastuti. **Dewan Redaksi:** Rizwan Pribhakti, Rezha S. Amran, Titi Susanti, Budi Sulisty, Pilar Wiratoma, Purwo Widiarto, Muchamad Maltazam, Sri Moeji S., Adya Asmara Muda, Hadi Surono, Ali Ridho, Agung Sudaryono, Budi Prayitno, Muchamad Ardani, Indratmo Kurniawan, Diah Sarkorini. **Tim Redaksi:** Irma Kesuma Dewi, Farida Rosadi, Pradany Hayyu, Dwinanda Ardhi, Danik Setyowati, Abdul Aziz, Resha Aditya Pratama, Rostamaji, Adelia Pratiwi, Adik Tejo Waskito, Cahya Setiawan, Arif Nur Rokhman, Maria Cecilia Kinanti, Ferdian Jati Permana, Sugeng Wistriono, Andi Abdurrochim, Shinta Septiana, Ika Dewi Puspitasari, Nur Muhlisin, Aditya Arifiyanto, Intan Nur S., Ardes Martua Yudito S., Emawan Setyo P., Azharuddin Priyotomo. **Redaktur Foto:** Anas Nur Huda, Tino Adi Prabowo, Gathot Subroto, Fransiscus Edy Santoso, Andi Al Hakim, Rhoric Andra F., Muhammad Fath Kathin, Adhi Kurniawan, Nur Iman, Agus Tri Hananto, Langgeng Wahyu Pamungkas, Arief Taufiq Nugroho, Arief Kuswanadji. **Desain Grafis dan Layout:** Arfindo Briyan Santoso, Venggi Obdi Ovisa, Victorianus M.I. Bimo, Dimach Oktaviansyah Karunia Putra. **Alamat Redaksi:** Gedung Djuanda 1 Lantai 9, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Telp: (021) 3849605, 3449230 pst. 6328/6330. **E-mail:** mediakeuangan@kemenkeu.go.id.

Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi. Bagi tulisan atau artikel yang dimuat akan mendapatkan imbalan sepiantasnya.

Ralat Majalah Media Keuangan Volume XIII/NO. 125/Februari 2018. Halaman 52 tertulis "Teks Farida Rosadi" seharusnya "Teks Lutfiana Nadzroh". Majalah Media Keuangan Volume XIII/No. 130/Julai 2018. **Halaman 18** pada infografis bagian "Nilai BMN" tertulis "2017 (UNAUDITED) Rp2.188,36 (Triliun)" dan "2016 (AUDITED) Rp4.191,06 (Triliun)" seharusnya "2016 (AUDITED) Rp2.188,36 (Triliun)" dan "2017 (UNAUDITED) Rp4.191,06 (Triliun)". Mohon maaf atas kesalahan ini.



MEDIA KEUANGAN adalah majalah resmi Kementerian Keuangan. Memberikan informasi terkini seputar kebijakan fiskal didukung oleh narasumber penting dan kredibel di bidangnya.

MEDIA KEUANGAN saat ini dapat diunduh melalui



App Store



Google Play



TARIF TURUN!

Mengapa Turun?

- Untuk mendorong peran masyarakat dalam kegiatan ekonomi formal
- Memberi kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan
- Lebih memberikan keadilan bagi UMKM
- Memberi kesempatan berkontribusi bagi negara

Siapa pengguna tarif ini?



Orang Pribadi

Jangka Waktu 7 Tahun



Badan (CV, Firma & Koperasi)

Jangka Waktu 4 Tahun



Badan (PT)

Jangka Waktu 3 Tahun

yang mendapatkan penghasilan dari **USAHA** dengan **omzet** tidak melebihi

4,8 Miliar
dalam setahun

USAHA antara lain usaha dagang, industri, dan jasa seperti misalnya toko/kios/los kelontong, pakaian, elektronik, bengkel, penjahit, warung/rumah makan, salon, dan usaha lainnya.



Bagaimana menghitung pajaknya?

0.5% x Omzet

Info lebih lanjut
silakan hubungi



www.pajak.go.id/setengahpersen

Dari Lapangan Banteng

Dukung Asian Games untuk Indonesia

Adakah yang mengetahui kesamaan antara Stadion Gelora Bung Karno, Jembatan Semanggi, TVRI, Patung Selamat Datang, dan Hotel Indonesia? Berdasarkan sejarahnya, semua tempat tersebut dibangun oleh pemerintahan Presiden Soekarno untuk menyambut Asian Games ke-4 yang diselenggarakan di Jakarta pada tahun 1962. Setelah 56 tahun berlalu, Indonesia kembali menjadi tuan rumah Asian Games. Meskipun pembukaannya tetap di Jakarta, Asian Games ke-18 juga akan diselenggarakan di Palembang.

Sebagai tuan rumah, Indonesia mempercantik diri untuk menyambut kedatangan para atlet tamu dari mancanegara di Asia. Selain persiapan infrastruktur, promosi dalam bentuk spanduk, umbul-umbul, dan billboard mengenai Asian Games juga turut meramaikan Jakarta dan Palembang. Masyarakat pun mulai dihargakan dengan lagu tema Asian Games. Mendekati bulan Agustus, demam Asian Games mulai melanda Indonesia.

Dua tahun lalu, ketika Indonesia menggantikan Vietnam untuk menjadi tuan rumah Asian Games ke-18, fasilitas utama olahraga di Jakarta dan Palembang mulai diperbarui. Kawasan olahraga Senayan diperbaiki, stadion dipercantik, dan sudah mulai diujicoba dengan pertandingan sepakbola. Termasuk juga pembangunan kawasan olahraga Jakabaring di Palembang.

Selain pembangunan infrastruktur olahraga tersebut, pembangunan dan pembaharuan fasilitas pendukung seperti Light Rail Transit (LRT), wisma atlet, jalan, dan Gelanggang Olah Raga juga turut dibangun. Pemerintah mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk semua infrastruktur ini.

Total biaya penyelenggaraan termasuk pengeluaran operasional INASGOC, anggaran K/L untuk dukungan penyelenggaraan Asian Games, dan persiapan atlet sekitar Rp7,2 triliun. Sedangkan untuk investasi konstruksi sendiri sekitar Rp27,4 triliun untuk kota Jakarta dan Palembang. Selain itu, biaya yang dikeluarkan juga terkait dengan

berbagai persiapan pelatihan bagi atlet, akomodasi, honor pelatih dan biaya lainnya yang berhubungan dengan Indonesia sebagai tuan rumah sekaligus juga sebagai peserta Asian Games.

Agar pembangunan fisik dapat berkesinambungan pemakaiannya, tentu saja harus dilakukan pemeliharaan yang rutin dan terjaga. Selain pembiayaan pemeliharaan dari pemerintah, adalah tanggungjawab seluruh masyarakat untuk menjaga kebersihan, keamanan dan kenyamanannya agar dapat terus digunakan sepanjang masa. Fasilitas olah raga ini tidak boleh berhenti digunakan setelah selesainya Asian Games ke-18. Fasilitas ini harus menjadi kawah chandradimuka bagi atlet Indonesia di masa datang. Indonesia dapat menjadi bangsa yang besar, termasuk di bidang olah raga. Indonesia bisa!

Nufransa Wira Sakti,
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi

Kementerian Keuangan Republik Indonesia
@kemenkeuRI

Sampaikan dukunganmu terhadap penyelenggaraan #Asiangames2018 di Indonesia.

@thereds_86

#Asiangames2018 adalah momentum buat Indonesia. Momentum memperbaiki prestasi olahraga kita sekaligus memperkenalkan Indonesia di tingkat dunia. Momentum melakukan perbaikan/pembangunan berbagai fasilitas negara yang kita gunakan untuk jangka panjang.

@Bembyeah_

(1/2) Semarakkan #Asiangames2018 jadikan event ini bukan sekedar olahraga tapi momentum perbaikan pengelolaan olahraga dan kompetisi, perekat kesatuan bangsa, memperkenalkan Indonesian ke dunia dan sebagai bukti Indonesia (masih) negara besar

(2/2) Semoga #Asiangames2018 juga memberikan peningkatan ekonomi secara mikro, saya harap pemerintah memberi ruang kepada ekonomi kreatif masyarakat di tengah #Asiangames2018

@myuusuff31

Nonton Asian Games bersama dia Jangan lupa untuk ketawa Mari Mengaung Macan Asia Untuk jadi yang teristimewa.. Semangat Tim Indonesia , Jaga sportifitas dan tetap semangat. Kami selalu mendukung dan mendoakan mu, untuk membawa Indonesia semakin jaya



Ksatria Negara

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyelenggarakan event tahunan kejuaraan karate yang diikuti oleh para penggiat karate dari kantor-kantor Bea Cukai seluruh Indonesia. Kejuaraan bertujuan untuk membentuk Jiwa Ksatria, Sehat, Tangguh, Sportif dan Santun untuk Bea Cukai Makin Baik. Selain sebagai ajang kompetisi, diharapkan melalui event ini seluruh karateka dapat mengaplikasikan janji karate dalam kesehariannya khususnya sebagai pegawai Bea Cukai.

Foto
Jodie Umbara



Wajah Baru Lapangan Banteng

Taman Lapangan Banteng adalah salah satu paru-paru kota Jakarta yang sangat dibutuhkan warga Ibukota. Namun karena termakan usia, taman ini membutuhkan revitalisasi. Hal ini diperlukan, mengingat banyak warga yang membutuhkan kegiatan fisik seperti *jogging*, basket, sepakbola, atau hanya sekedar jalan-jalan menikmati udara segar. Revitalisasi Taman Lapangan Banteng dibiayai oleh beberapa perusahaan swasta sebagai bentuk *Corporate Social Responsibility* (CSR). Biaya revitalisasi diperkirakan sebesar Rp60 miliar.

Foto
Anas dan
Resha



12/07

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI



Konferensi Pers Divestasi Saham PT. Freeport Indonesia

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengumumkan telah dilakukan Penandatanganan Pokok-Pokok Kesepakatan Divestasi Saham PT. Freeport Indonesia antara PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) dan Freeport-McMoran Inc. (FCX). Hal ini disampaikannya di hadapan awak media pada Konferensi Pers bersama dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan di Aula Mezzanine Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Kamis (12/07).

Industri Pertambangan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero), atau INALUM, Freeport McMoran Inc. (FCX) dan Rio Tinto, telah melakukan penandatanganan Pokok-Pokok Perjanjian (*Head of Agreement*) terkait penjualan saham FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di PT Freeport Indonesia (PTFI) ke INALUM. Kepemilikan INALUM di PTFI setelah penjualan saham dan hak tersebut menjadi sebesar 51 persen dari semula 9,36 persen. “Landasan hukum yang mengatur hubungan antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT Freeport Indonesia akan berupa izin usaha pertambangan khusus operasi produksi atau IUPK dan bukan dalam bentuk kontrak karya. Divestasi saham sebesar 51 persen untuk kepemilikan Nasional Indonesia dan PT Freeport Indonesia membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter di dalam negeri,” ungkap

Menkeu ketika membacakan beberapa poin kesepakatan yang telah dicapai.

Menkeu menjelaskan pokok-pokok perjanjian ini selaras dengan kesepakatan antara Pemerintah Indonesia, Pemerintah Provinsi Papua, dan Pemerintah Kabupaten Mimika, dimana pemerintah daerah akan mendapatkan saham dari kepemilikan saham PT Freeport Indonesia. “Untuk mendukung divestasi saham antara lain telah dilakukan penandatanganan perjanjian dengan pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika yang terjadi pada tanggal 12 Januari 2018 di mana pemerintah daerah Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika secara bersama-sama akan memiliki hak atas saham PT Freeport sebesar 10 persen,” ujar Menkeu.

Lebih lanjut Menkeu menjelaskan, untuk mendukung peningkatan penerimaan negara sesuai yang diamanatkan dalam Pasal 169 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara atau Undang-Undang Minerba telah memastikan tersedianya regulasi bagi semua investor di dalam rangka memberikan stabilitas pembayaran kewajiban penerimaan negara. “Harapan pemerintah dengan pemberian stabilitas penerimaan negara di samping akan meningkatkan penerimaan negara juga akan menjadi komitmen Pemerintah di dalam menjaga iklim investasi yang pasti dan kondusif,” ujar Menkeu.

28/06

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI



Sosialisasi Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan sambutan pada acara Sosialisasi Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan pada Kamis (28/06). Menkeu menegaskan perlunya jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengevaluasi proses dan alokasi penganggaran secara teliti dan strategis. “Perencanaan penganggaran itu menjadi sangat-sangat kritikal. Coba kita lihat secara nasional, 524.000 DIPA itu selalu mengalami revisi. Jadi, kita bayangkan betapa proses penganggaran kita itu masih perlu diperbaiki. Kalau kita tidak efisien, tidak *organized*, tidak bisa membedakan yang prioritas tinggi, prioritas rendah dan yang bukan prioritas (maka) kita sendiri yang akan menderita,” tegas Menkeu.



03/07

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

Penyampaian RUU Pertanggungjawaban APBN 2017

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menilai pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2017 merupakan tahun terbaik dalam pengelolaan keuangan negara dibandingkan capaian APBN beberapa tahun terakhir. Hal ini disampaikan Menkeu pada pidatonya mengenai Pokok-Pokok Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2017 pada Sidang Paripurna DPR RI yang ke-28, Masa Persidangan ke-V, Tahun Sidang 2017-2018 di Gedung Nusantara II, Komplek DPR-MPR, Jakarta pada Selasa (03/07). “Pelaksanaan APBN Tahun 2017 dan pengelolaan perekonomian nasional sepanjang tahun 2017 menunjukkan pencapaian yang positif. Sehingga dapat dikatakan tahun 2017 merupakan tahun terbaik pengelolaan APBN,” ungkap Menkeu.

04/07

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

Wamenkeu Membuka Acara AIFC 2018

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo memberikan *keynote speech* sekaligus membuka acara The 3rd Annual Islamic Finance Conference (AIFC) yang bertema “Enhancing The Role of Islamic Finance within Digital Economy Era: Opportunities and Challenges” di Makassar pada Rabu (04/07). Menurut Wamenkeu, salah satu kekuatan distribusi dalam ekonomi digital ini adalah fintech yang muncul sebagai terobosan. Asosiasi *fintech* Indonesia menunjukkan bahwa jumlah perusahaan *fintech* Indonesia telah berkembang secara signifikan dari 25 perusahaan di 2011-2012 menjadi 165 perusahaan di 2015-2016. “Perusahaan-perusahaan *fintech* ini menjalankan model bisnis seperti peminjaman atau lending, pembayaran *digital marketplace* dan perencanaan keuangan. Data Bank Indonesia juga menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dari nilai transaksi pasar *fintech* yang berjumlah 18,6 miliar dolar di tahun 2017 dan meningkat 19,23 di tahun 2018,” ungkapnya.



10/07

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI
Biro KLI



Menkeu Hadir pada Dialog Pendidikan Bersama Wapres RI

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama dengan berbagai pihak agar perencanaan di bidang pendidikan menjadi lebih baik lagi. Hal ini disampaikan dalam acara Dialog Pendidikan Bersama Wakil Presiden Republik Indonesia dengan tema “Cetak Biru Pengembangan SDM Indonesia Menghadapi Revolusi Industri 4.0” di Gedung Guru, Jakarta pada Selasa (10/07). “Saya akan siap untuk bekerja sama untuk memperbaiki bagaimana perencanaan pendidikan yang baik. Saya berharap para guru dan sekolah semua komitmen untuk memperbaiki yang disebut Indeks Kualitas dari Hasil Belajar Mengajar,” tegasnya. Menkeu berpesan, dengan intensifnya guru bertemu para siswanya, guru dapat ikut menjaga ide Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, makmur, dan menjaga seluruh tumpah darahnya sesuai dengan keinginan para pendiri bangsa.

Kick Off Program Secondment Sinergi DJP-DJBC

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengapresiasi upaya Direktorat Jenderal Pajak (DJP)-Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk saling memperkuat tugas dan fungsinya. Program *secondment* Sinergi DJP-DJBC tahun 2018 ini merupakan program pertukaran pegawai dengan tujuan saling memahami bidang kerja masing-masing unit. Hal ini disampaikan dalam “Kick off Program *Secondment* Sinergi DJP-DJBC tahun 2018 di Aula Djuanda Kementerian Keuangan, Selasa (10/07). Saya sangat menghargai upaya dari seluruh jajaran pimpinan Pak Wamen, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea Cukai dan seluruh stafnya yang memiliki kepercayaan, memiliki semangat melakukan join atau *secondment* untuk memahami kultur tugas tanggung jawab dan bahkan pemikiran dan kebiasaan dari masing-masing institusi, ujar Menkeu. Ia menyatakan program ini tidak untuk menyatukan DJP dan DJBC menjadi satu institusi, karena tugas yang diemban memang berbeda. Namun dengan perbedaan itu, Menkeu meminta agar keduanya bersinergi agar dapat makin memperkuat penerimaan negara.



10/07

Teks
Biro KLI
Foto
Biro KLI

14/07

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI



Upacara Peringatan Hari Pajak 2018

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati berpesan dalam peringatan Hari Pajak tiap tanggal 14 Juli menjadikannya tonggak dalam memelihara semangat dan melaksanakan tugas konstitusi. “Berdasarkan Undang-Undang, kata “pajak” pertama kali muncul pada tanggal 14 Juli 1945. Oleh karena itu, saya menyambut gembira bahwa tanggal 14 Juli kita peringati (sebagai Hari Pajak) setiap tahun. Peringatan ini tentu akan dijadikan tonggak untuk terus memelihara semangat dalam menjaga dan melaksanakan tugas konstitusional,” kata Menkeu pada Sabtu, (14/07) di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta. Mengakhiri sambutannya, Menkeu berpesan untuk terus mensosialisasikan peran pajak sekaligus memberi pelayanan terbaik agar kualitas penerimaan dan kepatuhan pajak makin baik.

15/07

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

Menkeu Hadiri Dies Natalis PKN STAN

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan para pejabat eselon satu Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Minggu (15/07) hadir dalam acara Dies Natalis PKN STAN ketiga di kampus STAN, Tangerang. Menurut Menkeu, STAN adalah suatu perguruan tinggi yang berperan penting karena para mahasiswanya dipersiapkan untuk menjadi pengelola keuangan negara yang menjaga keuangan negara. Menkeu mengingatkan kepada para mahasiswa bahwa proses untuk menjadi mahasiswa adalah proses yang tidak mudah. “Anda semua yang belajar di sini adalah merupakan hasil saringan yang sangat ketat dari seluruh Indonesia. Bahkan saya dengar ada banyak mahasiswa yang sebetulnya diterima di perguruan tinggi negeri lain yang bagus, namun pada akhirnya Anda memilih PKN STAN dan itu adalah luar biasa,” ungkapnya bangga.

17/07

Teks
Biro KLI
Foto
Biro KLI



Kuliah Umum Menkeu di Universitas Gadjah Mada Kampus Jakarta

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati berbagi informasi dan pengalaman bagaimana APBN dan peranan Kementerian Keuangan menyikapi ekonomi digital pada acara Kuliah Umum bertema APBN Menjawab Tantangan Era Digital Economy yang dilaksanakan di Program Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada Kampus Jakarta pada Selasa (17/07). Menkeu mengatakan yang sedang menjadi pembahasan antarnegara mengenai ekonomi digital adalah bagaimana respons dari sisi keuangan, tidak hanya pajak tapi kebijakan secara umum dalam menyikapi ekonomi digital. “Dengan teknologi yang sekarang digital dan akses seperti menjadi sangat meluas, maka diharapkan dalam jangka panjang, perekonomian dunia akan mengalami produktivitas yang makin tinggi,” tambahnya.



BERSIAP SAMBUT PERHELATAN

Gema penyelenggaraan Asian Games ke-18 semakin nyaring terdengar. Sebagai tuan rumah, Indonesia perlu memberikan sambutan terbaik bagi para peserta kompetisi se-Asia yang bertandang untuk bertanding. Termasuk juga wisatawan mancanegara yang ingin menyaksikan kompetisi secara langsung. Oleh sebab itu, pembangunan kawasan beserta infrastruktur utama dan pendukung dipersiapkan sebaik mungkin, sesuai anggaran yang telah ditetapkan. Kesuksesan penyelenggaraan acara diharapkan bisa memberi dampak positif bagi Indonesia. Salah satunya, menstimulasi perekonomian negara.

Mengulang sejarah

Ini adalah kali kedua Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games setelah 56 tahun lamanya. Sebelumnya, Indonesia pernah mendulang sukses dalam perhelatan olahraga terbesar se-Asia tersebut. Tujuh belas tahun setelah mengumumkan kemerdekaannya, pada 1962, Indonesia mengajukan diri sebagai tuan rumah Asian Games ke-4. Meski saat itu banyak negara yang menyangsikan, Indonesia mampu membuktikan kemampuannya secara gemilang.

Selain berhasil menduduki posisi kedua terbaik dalam

kompetisi, berkat kesuksesan acara, Indonesia mulai disegani negara-negara di dunia saat itu. Bahkan, warisan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Asian Games 1962, masih dapat dirasakan manfaatnya hingga kini.

Sebut saja Kompleks Gelora Bung Karno, Wisma Perkampungan Atlet, Jembatan Semanggi, Tugu Selamat Datang, Monumen Nasional, Taman Persahabatan (sekarang Lapangan Golf Senayan), Wisma Warta (sekarang Plaza Indonesia), hingga Hotel Indonesia. Selain itu, melalui Asian Games 1962 pula, Indonesia memiliki saluran televisi dan radio negara, yakni TVRI dan RRI.

Amin Rahayu, penulis buku Asian Games IV 1962, menyampaikan bahwa motivasi pemerintah Indonesia, sebagai tuan rumah saat itu, adalah untuk mengangkat nama, harkat, dan martabat Indonesia di mata dunia.

“Oleh karena itu, apa pun persyaratan dan berapapun biaya untuk penyelenggaraan Asian Games keempat, bagi Presiden Sukarno dianggap tidak masalah, tidak penting untuk dipermasalahkan, karena dampak politis, ekonomis, dan budayanya dianggap jauh lebih besar dari semua biaya yang dikeluarkannya,” kata Amin. Terlebih lagi, Indonesia pada masa itu, membutuhkan pengakuan dan legitimasi dari dunia internasional.

Persiapan Asian Games kini

Salah satu sarana dan prasarana olahraga yang dilakukan renovasi besar-besaran dalam rangka penyelenggaraan Asian Games 2018 adalah Kompleks Gelora Bung Karno (GBK). Terkait hal ini, Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Endra Saleh Atmawidjaja menyampaikan, renovasi pada GBK hampir menyentuh angka Rp3 triliun atau yang terbesar dibandingkan yang lain.

“Perbaikannya (diantaranya) meliputi stadion utama, *aquatic*, lapangan hoki, panahan, lapangan

Stadion Utama GBK warisan Asian Games 1962, kembali menjadi sarana utama Asian Games 2018

Foto Anas Nur Huda

sepak bola, *softball*, tenis, *baseball* dan *squash*,” jelasnya.

Endra menyampaikan, sarana dan prasarana yang dibangun dalam rangka penyelenggaraan Asian Games terdiri dari 60 *venue* dan 14 *nonvenue*. Dari total 60 *venue* tersebut, sebanyak 33 *venue* berada di Provinsi DKI Jakarta, 13 *venue* di Jawa Barat, dan 14 *venue* di Sumatera Selatan. Kementerian PUPR sendiri bertanggungjawab terhadap sebanyak 33 *venue*, sedangkan sisanya sebanyak 27 *venue*, dikerjakan oleh pemerintah daerah setempat.

Diakui Endra, pembangunan sarana dan prasarana kebanyakan merupakan perbaikan dari yang telah ada. “Jadi tidak semua dimulai dari nol. Jadi ada yang rehabilitasi saja, ada yang renovasi, ada yang pembangunan baru,” ungkapnya.

Modernisasi pada sarana dan prasarana Asian Games sekaligus dilakukan untuk memenuhi standar internasional. Beberapa diantaranya diakui Endra adalah yang terbaik se-Asia “Beberapa *venue* yang kita miliki, misalkan (sarana) dayung di Jakabaring, itu salah satu yang terbaik di Asia. Artinya, (memenuhi standar) dari sisi panjang, kondisi air, kondisi arus, hingga kelengkapan fasilitas pendukung,” katanya.

Besarnya anggaran

Sementara itu, terkait biaya penyelenggaraan Asian Games, Ketua Umum Indonesia Asian Games 2018 Organizing Committee (INASGOC), Erick Tohir, menyampaikan sebelumnya besaran anggaran yang diajukan sebesar Rp8,7 triliun. Namun, INASGOC berhasil melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp3,5 triliun menjadi total Rp5,2 triliun. Jumlah tersebut belum termasuk pajak sebesar Rp1 triliun dan sponsor sebesar Rp800 miliar, sehingga total anggaran yang ada mencapai Rp7 triliun. Pendapatan sponsor sendiri melebihi target sebelumnya, dari sekitar Rp300 miliar menjadi sekitar Rp800 miliar.

Meski demikian, Erick mengaku INASGOC memerlukan tambahan dana sebesar Rp215 miliar karena meningkatnya jumlah peserta. Sejauh ini telah terkonfirmasi bahwa jumlah peserta, baik dari atlet dan ofisial, meningkat jumlahnya menjadi 16.920 orang. Jumlah ini 20 persen lebih banyak, jika dibandingkan jumlah peserta pada Asian Games 2014 di Korea.

Erick menambahkan, dalam penggunaan dana yang sedemikian besar, diupayakan dilakukan secara transparan dan profesional. “Maka itu, kami jauh-jauh hari sudah bekerja sama dengan TP4 Kejaksaan, BPKP, LKPP bahkan BPK sudah masuk lebih awal. Kita juga sudah komunikasikan ke KPK karena jangan sampai nanti kita hanya sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, tapi administrasi *enggak* sukses,” ujar Erick.

Mengkaji dampak ekonomi

Menjadi hal yang wajar, saat terdapat perhelatan acara besar dengan dana besar, dilakukan kajian atas dampak acara tersebut bagi perekonomian. Untuk itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro, menyampaikan institusinya saat ini tengah mengkaji dampak ekonomi Asian Games 2018 bagi Indonesia.

“Kita melakukan kajian ini bukan dalam konteks pengamat, tapi sebagai pemerintah yang ingin tahu. Pertama, berapa besar manfaatnya. Kedua, bagaimana caranya agar *event* ini tidak gagal, artinya tidak memberatkan secara ekonomi,” jelas Bambang.

Dalam kajian dimaksud, terdapat sedikitnya tiga kegiatan ekonomi yang berdampak langsung bagi Indonesia. Pertama, dari sisi investasi pemerintah dalam membangun infrastruktur pendukung dan sarana olahraga. Jumlah pengeluaran pemerintah dalam kegiatan ini mencapai Rp27,4 triliun yang telah dimulai pada pada 2014. Kedua, kegiatan operasional dalam persiapan dan

penyelenggaraan acara sebanyak Rp7,2 triliun. Ketiga, pengeluaran yang dilakukan pengunjung dari dalam maupun luar negeri selama acara berlangsung mencapai Rp3,7 triliun. Kegiatan dimaksud akan mengungkit secara langsung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Kajian Bappenas juga memperkirakan, tidak kurang dari 45 negara mengikutsertakan 10 ribu atletnya pada 40 cabang olahraga di 462 pertandingan pada Asian Games 2018 ini. Di samping itu, acara juga melibatkan sekitar 5 ribu ofisial, 7 ribu media, 13 ribu sukarelawan, serta 2 juta penonton. Jika berkaca pada penyelenggaraan Asian Games 2014 di Incheon, Korea Selatan, sebanyak 200 ribu penonton merupakan wisatawan mancanegara yang datang untuk menyaksikan pertandingan secara langsung. Sebaran peserta dan penonton diperkirakan akan memenuhi Jakarta dan Palembang, masing-masing sebanyak 70 persen dan 30 persen.

Bappenas juga membagi dampak ekonomi ini dalam tiga waktu, yaitu sebelum, saat, dan setelah acara. Kegiatan ekonomi yang terjadi sebelum acara adalah kegiatan promosi pariwisata, belanja operasional dalam rangka persiapan Asian Games, serta belanja infrastruktur. Belanja operasional ini masih berlanjut saat pelaksanaan acara, ditambah dengan belanja yang dilakukan oleh para wisatawan pengunjung. Selanjutnya, paska-acara dilaksanakan, diharapkan terjadi peningkatan pada jumlah wisatawan mancanegara.

Berbagai kegiatan dimaksud diprediksi akan membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan rumah tangga dan pertumbuhan



Tidak kurang dari 45 negara berpartisipasi dalam Asian games 2018

Foto
Dok. KLI

di sektor pariwisata, serta meningkatkan pendapatan lokal, hingga penerimaan negara. Pada akhirnya, seluruh kegiatan berdampak pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Terkait hal ini Endra, Kepala Komunikasi Publik Kementerian PUPR, memiliki pandangan senada, “*Kan* dia (wisman) tidak mungkin sudah jauh-jauh datang dari luar negeri ke sini hanya untuk itu (menonton pertandingan). Pasti dia akan melakukan sesuatu. *Nah* itu yang kita harapkan. Dengan lamanya tinggal di Jakarta itu bisa *spending*, bisa bawa oleh-oleh, bisa juga mau menjadi duta untuk turisme ke Indonesia.”

Menurut Endra, kesuksesan Asian Games dapat diukur dari berbagai cara, salah satunya yang memiliki dampak bagi perekonomian. “Sukses penyelenggaraan ini kan bisa dari devisa negara masuk. Dari iklan, dari hak siar, dari hotel-hotel, dari restoran, dari *souvenir*, dan travel perjalanan. *Nah* itu semua yang bisa *generate* pertumbuhan ekonomi. Paling tidak di kota-kota yang menjadi destinasi pertandingan,” katanya.

Agar berdampak optimal

Meski demikian, Bappenas memberi catatan sejumlah syarat yang perlu dipenuhi agar dampak ekonomi bisa diperoleh lebih optimal. Pertama, terkait peningkatan utilisasi aset paska-acara. Besarnya investasi yang dikeluarkan pemerintah dalam pembangunan sarana olahraga bisa saja berdampak negatif. Pengalaman yang terjadi di banyak negara menunjukkan, dampak negatif terjadi manakala

pemanfaatan aset paska-acara kurang optimal dan tidak sebanding dengan investasi yang dikeluarkan maupun biaya perawatan yang perlu ditanggung.

Hal tersebut juga disampaikan Endra. Dia mencontohkan renovasi Komplek Gelora Bung Karno yang pada kesempatan kali ini menelan cukup banyak anggaran.

“Ini *kan* investasi yang besar untuk modernisasi. *Nah* jadi nanti PPKGBK -Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno- harus memikirkan bagaimana pengoperasian dan pemeliharaan dari prasarana sarana itu. Agar pada saat dia tidak digunakan sebagai *event*, dia tidak menjadi beban, sehingga harus dicari *event* reguler selama setahun untuk menutup biaya operasional dan pemeliharaan,” jelasnya.

Selanjutnya, selain yang terkait dengan utilitas aset, Bappenas juga mensyaratkan perlunya peningkatan destinasi wisata dan paket wisata yang lebih masif agar dampak ekonomi penyelenggaraan Asian Games dapat lebih optimal.

Menurut Bambang, *event* olahraga bergengsi seperti Asian Games menjadi salah satu cara yang efektif untuk mencetak *image* baik sebuah negara, serta menjadi ajang dalam mempromosikan wisata.

Sementara itu, berkaca pada penyelenggaraan Asian Games 1962, Amin Rahayu berharap Indonesia bisa mengulang kesuksesan yang sama, baik dari segi pelaksanaan kompetisi maupun prestasi.

“Kejayaan Indonesia pada 1962 ini tentu sangat penting dijadikan referensi. Bagaimana Indonesia pada saat itu berhasil, padahal situasi ekonomi dan politik saat itu kurang menggembirakan. Sedangkan pada saat ini, walaupun keadaan ekonomi dan politik dianggap biasa-biasa saja, tetapi jauh lebih baik dan maju bila dibandingkan dengan era tersebut. Untuk itu Indonesia pada Asian Games 2018 ini, perlu berupaya untuk mengulang kejayaan,” tutup Amin.

Teks Farida Rosadi

Semangat ASIAN GAMES 2018

Pembangunan Infrastruktur Asian Games 2018

Tahun 2018, Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan Asian Games yang ke-18. Ajang kompetisi olah raga internasional ini pemerintah untuk mempopulerkan Indonesia di mata dunia. Pemerintah lalu mempersiapkan diri dengan membangun beberapa infrastruktur dan fasilitas publik. Sebagian besar pembangunan ini menggunakan mekanisme keuangan negara. Melalui uang negara inilah, pemerintah mengajak semua lapisan masyarakat untuk memanfaatkan dan menghargai setiap rupiah yang telah dikeluarkan.

- Pembangunan Stadion Utama Gelora Bung Karno
- Pembangunan Wisma Atlet
- Pembangunan Velodrom Balap Sepeda
- Pembangunan Equestrian Cabang Pacuan Kuda
- Pembangunan Venue Untuk Pertandingan Sepeda BMX
- Pembangunan Light Rail Transit Rute Kelapa Gading-Velodrome (Jakarta)
- Pembangunan Light Rail Transit di Palembang
- Pembangunan Jakabaring Sport City
- Pembangunan Jalan Tol Palembang-Inderalaya
- Pembangunan Jalan Tol Kayu Agung-Palembang-Betung
- Pembangunan Flyover dan Jembatan Musi IV serta VI

Sumber:
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Olahraga Serta Prasarana dan Sarana Pendukung Dalam Persiapan Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018 dan Asian Para Games III Tahun 2018
Rivani, E. (2018). Potensi Asian games 2018 Bagi Perekonomian Indonesia. Info Singkat, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis. Bappenas

Dampak Ekonomi ASIAN GAMES 2018

Dampak Langsung

Rp27,4 T

Total Investasi Pemerintah untuk pembangunan infrastruktur pendukung dan sarana olahraga sejak tahun 2015-2018

Rp7,2 T

Total Operasionalisasi persiapan dan penyelenggaraan Asian Games tahun 2015 - 2018

Rp3,7 T

Total Pengeluaran peserta dan pengunjung

Dampak Tidak Langsung



Penciptaan lapangan kerja



Mempercepat pertumbuhan ekonomi



Penambahan pendapatan masyarakat

Perkiraan peserta dan pengunjung Asian Games 2018

Sumber: Bappenas



45

Negara



40

Cabang Olahraga



10.000

Atlet



5.000

Official



462

Pertandingan



7.000

Media



13.000

Sukarelawan



2 juta

Penonton



200 ribu

Wisman





DULANG PRESTASI OPTIMALKAN EKONOMI

Perhelatan akbar pesta olahraga Asian Games 2018 tinggal menghitung hari. Semenjak dimulai hitung mundur oleh Presiden Jokowi, berbagai persiapan baik dari segi sarana dan prasarana utama maupun pendukung telah dilakukan. Untuk mendukung hal itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pun dialokasikan dalam rangka mendukung persiapan kegiatan yang akan dimulai pada tanggal 18 Agustus 2018 ini.

Dalam penyelenggaraan kedua kalinya ini, pemerintah mengikutsertakan sektor swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menyukseskan acara. Keterlibatan ini menjadi

penting agar penyelenggaraan tidak hanya mengandalkan kemampuan pendanaan APBN yang terbatas. Sejak terpilih sebagai tuan rumah penyelenggara, pemerintah langsung membentuk Indonesia Asian Games 2018 Organizing Committee (INASGOC) sebagai panitia resmi pelaksana yang bertugas menyusun rencana, menyiapkan dan menyelenggarakan Asian Games 2018.

Dampak ekonomi ke Indonesia dari perhelatan akbar itu pun tak tanggung-tanggung. Menurut kajian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), total dampak langsung mulai dari persiapan tahun 2015 hingga 2018

diperkirakan mencapai Rp38,3 triliun. Angka tersebut berasal dari nilai investasi konstruksi sebesar Rp27,4 triliun, operasional penyelenggaraan sebesar Rp7,2 triliun dan potensi pengeluaran peserta dan pengunjung saat acara berlangsung sebesar Rp3,7 triliun.

Dampak ekonomi

Selain semangat berkompetisi dengan sportif, Asian Games 2018 juga diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap ekonomi Indonesia. Menurut Menteri PPN/Bappenas, Bambang P.S. Brodjonegoro, kajian dampak ekonomi perlu dilakukan mengingat kegiatan ini tidak berlangsung setiap saat. Untuk itu, perlu dibuat kajian terkait dampaknya baik secara mikro ataupun makro. Hal itu menjadi penting karena sebagai tuan rumah penyelenggara, pemerintah perlu tahu seberapa besar manfaat yang akan diperoleh, serta cara yang perlu dipersiapkan agar kegiatan tersebut tidak memberatkan secara ekonomi ke depannya.

“Kajian itu nanti ujungnya ke dampak total. Dampak total itu ada yang langsung ada yang tidak langsung. Yang langsung itu adalah dampak yang terjadi sebagai akibat adanya uang yang kemudian berputar karena penyelenggaraannya,” jelasnya.

Lebih jauh, menurut kajiannya, manfaat ekonomi dari dampak total penyelenggaraan Asian Games kali ini dapat berupa peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan

aktivitas ekonomi lokal dan domestik, menciptakan lapangan kerja baru, serta memberikan efek ekonomi lanjutan dalam jangka menengah dan panjang. Pihaknya melakukan kajian tidak hanya bersifat temporer selama kegiatan berlangsung, namun juga menghitung secara permanen atau dalam jangka panjang.

“Misalkan kegiatan pariwisata meningkat, saya ambil contoh yang gampang. Kegiatan pariwisata ini meningkat membuat apakah *economy out*, ekonominya juga berjalan lebih *dynamic*, lebih aktif. Kemudian, *income* dari pegawainya pun turut meningkat,” jelasnya.

Di sisi lain, Asian Games juga memiliki potensi memberikan manfaat nonekonomi. Misalkan, menurut kajian Bappenas, kegiatan tersebut dapat meningkatkan kohesi sosial dan mendorong perubahan budaya, perilaku, dan karakter masyarakat, meningkatkan kualitas tenaga kerja untuk kegiatan internasional, mendorong masyarakat melakukan aktivitas olahraga, mengajak generasi muda mengenal sportivitas, serta meningkatkan profil Indonesia di mata internasional.

Dukungan Bea dan Cukai

Sementara itu, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) juga turut mendukung terselenggaranya kegiatan Asian Games 2018. Salah satunya, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPUBC) Tipe C Soekarno Hatta telah membentuk

Tim Percepatan Layanan Asian Games 2018 dan Asian Para Games 2018. Tim ini akan memfasilitasi dan mendukung penuh penyelenggaraan Asian Games 2018 dan Asian Para Games 2018.

Proses mitigasi arus barang dan orang terkait penyelenggaraan Asian Games 2018 juga dilakukan dengan melalui proses koordinasi dengan pihak panitia penyelenggara, INASGOC dan INAPGOC untuk paragames. Dengan koordinasi tersebut, KPUBC Tipe C Soekarno Hatta dapat memperoleh data yang lebih valid dari pihak panitia terkait arus barang dan orang yang akan masuk dan keluar dalam rangka Asian Games dan Asian Para Games 2018. Data tersebut kemudian dapat dijadikan bahan antisipasi dalam proses pelayanan dan pengawasan kepabeanan yang berjalan di KPUBC Tipe C Soekarno Hatta.

“Pada dasarnya tidak ada aturan khusus. Namun, untuk proses percepatan diberikan alternatif proses *clearance* dan kesiagaan petugas 24 jam utk *support* kegiatan importasi barang dan kedatangan atlet/*officials* Asian Games,” jelas Kepala KPUBC Tipe C Soekarno Hatta, Erwin Situmorang, dalam wawancara dengan Media Keuangan.

Ditanya lebih jauh koordinasi teknisnya, selain bekerja sama dengan panitia penyelenggara, Erwin juga membentuk grup media sosial sebagai wadah komunikasi untuk menunjang efektifitas dan efisiensi penyelesaian proses kepabeanan atas barang keperluan

Menteri Keuangan mengunjungi pembangunan LRT di Palembang yang menggunakan APBN.

Foto
Dok. KLI

ASIAN GAMES MENGUBAH INDONESIA

kegiatan Asian Games dan Asian Para Games 2018. Selanjutnya, ia juga melakukan koordinasi dengan instansi di lingkungan Bandara Soekarno Hatta yang tergabung dalam Komunitas Bandara Soetta (Kombatta). Diantaranya adalah Bidang Imigrasi, Bidang Karantina, Angkasa Pura, Kepolisian, TNI, dan maskapai penerbangan yang ditandai dengan adanya Deklarasi Dukungan Penyelenggaraan Asian Games 2018 oleh Komunitas Bandara Soetta pada Kamis tanggal 12 Juli 2018 yang lalu.

Arus barang dan orang

Dengan semakin meningkatnya jumlah arus barang dan orang yang masuk ke dalam wilayah pabean Indonesia, setidaknya akan memberikan potensi kenaikan terhadap penerimaan negara. Potensi tersebut sebanding dengan arus barang dan orang dalam rangka penyelenggaraan Asian Games 2018. Meskipun secara umum DJBC akan memberikan berbagai fasilitas kemudahan atas impor maupun ekspor terkait penyelenggaraan Asian Games 2018, namun tentunya akan ada kegiatan impor atau ekspor yang melalui jalur umum dengan mekanisme pemenuhan kewajiban pabean sebagaimana mestinya.

Erwin juga menjelaskan bahwa masih ada berbagai tantangan ke depan yang perlu dimitigasi terkait penyelenggaraan Asian Games 2018. Pertama, adanya kebutuhan untuk memasukan dan/atau mengeluarkan barang dalam rangka kegiatan Asian

Games yang bersifat mendadak atau segera. Kedua, adanya potensi pemasukan dan/atau pengeluaran barang dalam rangka kegiatan Asian Games yang tidak dilengkapi dengan dokumen persyaratan kelengkapan, sehingga belum bisa dipastikan keterkaitannya dengan kegiatan Asian Games. Untuk itu, Erwin akan meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan pihak panitia penyelenggara agar hal-hal tersebut dapat dicegah atau diantisipasi dengan baik.

Pembangunan venue olahraga

Di samping mengatur anggaran dan lalu lintas daerah pabean, Kementerian Keuangan juga memberikan dukungan penuh melalui penyediaan aset yang berasal dari APBN. Beberapa tanah dan bangunan yang dijadikan *venue* Asian Games 2018 merupakan aset yang masuk dalam kategori Barang Milik Negara (BMN). Salah satunya adalah yang menjadi *venue* utama Komplek Gelora Bung Karno di Senayan.

Menurut Encep Sudarwan, Direktur Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), mengungkapkan bahwa *venue* dan wisma atlet merupakan aset yang dipergunakan oleh Kementerian Sekretariat Negara melalui Pusat Pengelola Kawasan Gelora Bung Karno dan Pusat Pengelola Kawasan Kemayoran. Kedua satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) ini bertanggungjawab mengelola dan menatausahakan aset eks-Asian Games.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen-PUPR) bertugas sebagai pelaksana kegiatan pembangunan dan renovasi. Selain itu, Kementerian Keuangan melalui DJKN bertugas pula menjadi Pengelola Barang yang memproses persetujuan penjualan bongkaran terhadap *venue* yang dilakukan renovasi dan bangunan yang harus dihapuskan karena penataan kawasan. Selain itu, atas pengelolaan wisma atlet, DJKN juga tengah memproses permohonan alih status dari Kemen-PUPR kepada Kementerian Sekretariat Negara. Lebih jauh, sebagai pembuat kebijakan, DJKN juga merumuskan kebijakan pengelolaan dan penatausahaan aset yang digunakan sebagai *venue* Asian Games dan wisma atlet.

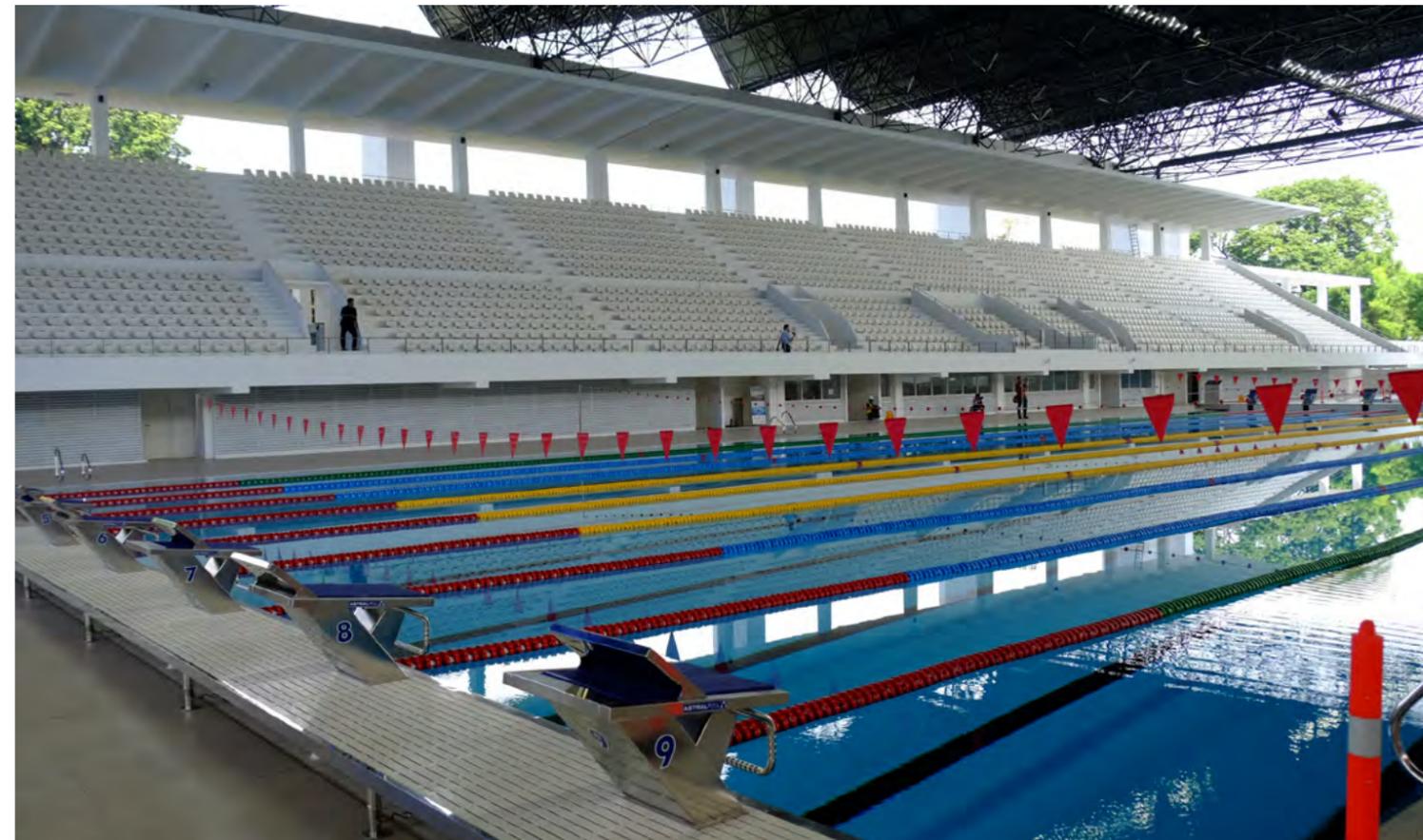
Pasca Asian Games

Setelah perhelatan pesta akbar olahraga empat tahunan tersebut usai, DJKN akan mengembalikan pengelolaan fasilitas olahraga dan *venue* agar dikelola oleh BLU yang berkaitan. Dengan model pengelolaan BLU tersebut diharapkan ke depan fasilitas olahraga yang telah dibangun dapat terus digunakan untuk menunjang kegiatan olahraga nasional dengan tetap menjaga aset yang telah dibangun agar tetap optimal.

Agar lebih optimal dan menghindari *idle asset*, BMN Asian Games baik yang berupa *venue* maupun wisma atlet akan dikelola oleh satuan kerja BLU dibawah Kementerian Sekretariat Negara melalui Pusat Pengelola Kawasan Gelora Bung Karno dan Pusat Pengelola Kawasan Kemayoran.

“Dengan fleksibilitas yang dimiliki dalam model pengelolaan BLU ini, diharapkan dapat memberikan keleluasaan untuk mengelola aset Asian Games sebagaimana praktik-praktik bisnis yang terbaik tanpa mengesampingkan tata kelola sesuai peraturan perundangan yang ada. Dengan demikian, diharapkan aset eks-Asian Games akan terus terjaga dan memberikan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) yang optimal dengan tetap memperhatikan fungsinya sebagai pusat pengembangan olahraga nasional,” papar Encep.

Teks Abdul Aziz



M enghadapi Asian Games 2018, Indonesia bukan hanya menyiapkan *venue* pertandingan. Sebagian besar perhatian justru dicurahkan untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur utama dan penunjang. Diantaranya LRT, bandara, dan kawasan olahraga. Artinya, melalui acara ini, Indonesia khususnya Jakarta dan Palembang akan menata ulang kondisi kota.

Salah satu venue olahraga air.

Foto
Anas Nur
Huda



“Persiapan *event* olahraga makin kompleks. Kita bisa jalan hanya kalau semua pihak bersatu. Semua masyarakat mesti *exciting*. Ini bisa menjadi batu loncatan bagi atlet-atlet kita untuk menuju Olimpiade 2020.”

Erick Thohir
Ketua Inasgoc

Pemanfaatan Venue dan Infrastruktur

Bambang Brodjonegoro, Menteri PPN/Bapenas mengatakan, pilihan transportasi baru yang manusiawi dengan sendirinya akan mendorong warga kota untuk menggunakan kendaraan umum. “Kalau dulu mau kemana-mana kita langsung berpikir mau naik bis kota. Nah, ke depan, kalau bicara angkutan umum, yang muncul di benak publik langsung Trans Jakarta, LRT atau MRT,” kata Bambang.

Dijelaskan Bambang lebih lanjut, masyarakat umum bisa memanfaatkan lokasi perlombaan dalam jangka panjang. Sebab, cabang olahraga yang kurang populer sekalipun tetap ada induknya di Indonesia. Setelah Asian Games selesai, para atlet nantinya jadi punya tempat berlatih yang lebih banyak dan lebih berkualitas.

Asian Games 2018

justru menjadi momen untuk memperbaiki prestasi olahraga dari hal yang paling mendasar, yakni sarana yang layak. “Kalau tidak ada Asian Games, saya tidak yakin akan ada perbaikan serius. “Saya ingat, *hall* serbaguna di Senayan sudah tidak layak pakai. Tetapi sekarang sudah baru sama sekali,” kata Bambang.

Sesudah Asian Games 2018 rampung, wisma atlet di kawasan Kemayoran akan disulap menjadi apartemen kelas menengah. Ini juga untuk mengubah pola pikir masyarakat untuk beralih dari rumah tapak. “Tanah di Jakarta sudah terbatas. Untuk kota seperti Jakarta hunian vertikal lebih masuk akal,” ucap Bambang.

Sementara, untuk *venue* olahraga yang sifatnya di dalam ruangan seperti seni bela diri, wushu, angkat besi bulu tangkis, ruangan rencananya akan dimanfaatkan untuk beragam kegiatan. Misalnya acara musik, pendidikan, festival, pameran, atau bahkan atraksi wisata.

Keuntungan Ekonomi

Ditanya mengenai angka keuntungan, Bambang mengatakan bahwa perhitungan penyelenggaraan olahraga dibagi menjadi tiga tahap, yakni sebelum, selama, dan sesudah pelaksanaan acara. Umumnya, negara penyelenggara punya waktu 6 tahun untuk mempersiapkan diri. Dengan begitu, keuntungan ekonomi dihitung 6 tahun sebelum acara, selama acara, dan 6 tahun sesudah acara berlangsung.

Bambang mencontohkan, Olimpiade musim panas ke-30 di London berhasil memberikan kontribusi terhadap PDB Inggris

hingga USD16,5 miliar dalam kurun 12 tahun. Komposisinya 82 persen *free event*, 12 persen pariwisata, dan 6 persen pengeluaran langsung. Olimpiade musim panas ke-27 di Sidney juga berhasil meningkatkan ekonomi hingga USD490 juta per tahun selama 12 tahun.

Namun, karena Indonesia baru ditunjuk untuk menggantikan Vietnam pada tahun 2016, maka keuntungan sebelum acara hanya bisa dihitung dua tahun. “Namun, hal yang penting kita tidak hanya menghitung tahun, tetapi menghitung dampak langsung maupun tidak langsung,” ujar Bambang.

Erik Thohir, Ketua Inasgoc menambahkan, dalam jangka pendek saja sudah banyak keuntungan yang diberikan. Penjualan souvenir membuat UKM bergerak. Begitu pula dengan penyewaan hotel, penyewaan kendaraan, jasa katering, hingga jasa jasa telekomunikasi. Apalagi jumlah delegasi negara peserta hampir mencapai 17 ribu orang yang terdiri dari atlet dan *officials*. “Dari sini saja kami perkirakan kita sudah bisa balik modal biaya penyelenggaraan,” kata Erik.

Erik mengingatkan, Asian Games bukan sekedar pertandingan olahraga. Lebih dari itu, acara ini sebenarnya menjadi peluang untuk mempromosikan Indonesia. Pawai obor Asian Games 2018 atau *torch relay* sengaja dirancang untuk melintasi daerah wisata. Diantaranya Danau Toba, Bukit Tinggi, Gilimanuk, Banyuwangi, Tanjung Bira, hingga Raja Ampat.

Satu warisan yang paling membanggakan dari Asian Games nantinya kata Erik adalah ruang publik baru yang lebih tertata. Ada taman-taman baru, jalur pejalan kaki, dan kawasan olahraga. Ini juga mengingatkan kita untuk menjadi kota yang ramah dan bersahabat sehingga bisa bersaing dengan kota-kota lain di dunia,” kata Erik.

Warisan lain yang tak boleh dilupakan, tambah Erik, adalah modal manusia. Sebanyak kurang lebih 15 ribu sukarelawan Asian Games 2018 rata-rata berusia di bawah 30 tahun. Mereka bisa membagikan ilmu dan pengalamannya selama berkolaborasi untuk Asian Games. “Jadi ajang ini juga bisa membangun karakter bangsa. Misalnya budaya disiplin waktu atau membuang sampah pada tempatnya,” tutup Erik.

Teks Irma Kesuma

ASIAN GAMES DAN DAMPAKNYA BAGI INDONESIA



Bambang P.S. Brodjonegoro, Menteri PPN/ Kepala Bappenas

Foto
Resha Aditya

Indonesia menjadi tuan rumah *event* Asian Games ke-18. Suatu kehormatan bagi negara kita menjadi tuan rumah lagi setelah 56 tahun berlalu. Dalam penyelenggaraan *event* berskala besar, suatu negara perlu memperhitungkan dampak ekonomi secara makro, disamping perhitungan bisnis yang bersifat mikro. Tekait hal ini, Bambang Brodjonegoro, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia menjelaskan mengenai dampak Asian Games bagi Indonesia sebagai negara tuan rumah.

Bagaimana dampak ekonomi dari penyelenggaraan Asian Games di Jakarta dan Palembang?

Jika berbicara dampak ekonomi, dampak total itu ada yang langsung ada yang tidak langsung. Yang langsung itu adalah dampak yang terjadi sebagai

akibat adanya uang yang kemudian berputar karena penyelenggaraannya. Jadi kita bagi intinya kalau dampak menurut waktu, yaitu periode sebelum, saat, dan sesudah *event*. Untuk dampak periode sebelum *event*, yaitu termasuk persiapan selama 2 tahun ini, ada infrastruktur yang dibangun. Apakah infrastruktur yang sifatnya menunjang, misalnya LRT, ataupun infrastruktur untuk mendukung kegiatan di Asian Games tersebut. Selain itu juga pembuatan *venue* baru ataupun renovasi *venue*. Kemudian, biaya dari marketing, biaya dari persiapan yang sudah dikeluarkan.

Untuk dampak pada saat *event* memang kita akan mengandalkan kepada data aktual. Saat ini kita masih memakai data perkiraan, misalkan berdasarkan *entry by name* yang sudah ada. Nah untuk data jumlah wisatawan atau pengunjungnya, itu baru estimasi sementara. Tapi nanti akan dapat kita pastikan ketika *event* sudah

berlangsung. Jadi, sudah dapat data real berapa sih penambahan wisatawan ketika event Asian Games tersebut.

Bagaimana penjelasan dampak ekonomi langsung dan tidak langsung dari penyelenggaraan Asian Games?

Dampak ekonomi ini kan kita bagi dua, langsung, tidak langsung. Dampak langsung itu yang benar-benar *spending* yang langsung keluar terkait dengan *game*-nya sendiri. Kalau dampak tidak langsung itu ada tiga. Pertama, ada *output multiplier*-nya, yaitu ada tambahan kegiatan ekonomi karena ada event. Kedua adalah *income multiplier*, yaitu tambahan pendapatan masyarakat sebagai akibat adanya event. Ketiga, *employment multiplier*, yaitu tambahan pekerjaan, tambahan kesempatan kerja ketika ada Asian Games.

Tambahan ini tidak hanya bersifat temporer hanya selama *games*, tapi secara permanen, secara jangka panjang. Kenapa, karena misalnya begini. Gara-gara ada Asian Games misalkan kegiatan pariwisata meningkat. Saya ambil contoh yang gampang. Kegiatan pariwisata ini meningkat membuat kegiatan ekonomi lebih aktif. Kemudian *income* pegawai meningkat karena terpaksa menambah hotel karena katakan setelah orang datang ke Jakarta lihat Asian Games, menganggap Jakarta itu tempat yang menarik juga untuk dilihat.

Kemudian harus ada penambahan aktivitas hotel. Kalau dulu mungkin *shift* nya cuma 2, sekarang perlu 3 misalkan. *Kan* belum berarti ada perekrutan

tenaga kerja baru ada *employment multiplier*. Tenaga kerja baru itu *kan* berarti digaji. Berarti *income* masyarakat juga membaik. Kemudian kalau ada orang beli *souvenir*, beli *merchandise*, itu juga membuat UKM nya bergerak. Ketika UKM nya bergerak, dia pasti membutuhkan tambahan tenaga kerja atau mungkin memperbaiki upah karyawannya. Jadi, itu 2 jenis *impact* yang dilihat.

Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menghitung keuntungan yang didapat?

Tergantung. Biasanya kan dihitung berdasarkan periode sebelum, saat, dan sesudah event. Periode sebelum event itu kan berarti ketika suatu kota/negara dari mulai ditunjuk sampai event berlangsung. Kalau berkaca pada Olimpiade London 2012 mungkin hampir sama, sekitar 6 tahun harusnya. Enam tahun sebelum, kemudian periode eventnya yang mungkin cuma 2 minggu, dan 6 tahun sesudahnya. Karena kita harus melihat dari dampak 6 tahun yang ke belakang dengan 6 tahun yang ke depan.

Kalau diaplikasikan di negara kita, mungkin karena kita cuma punya persiapan 2 tahun itu, maka perhitungan 2 tahun di belakang, perhitungan saat 18 Agustus - 2 September sendiri, dan periode setelahnya minimal 2 tahun. Tapi saya rasa kita bisa hitung lebih karena beberapa infrastruktur bisa punya manfaat lebih jauh.

Apakah ada contoh negara penyelenggara yang berhasil dengan event olahraga internasional?

Contohnya Olimpiade London, yang berhasil pada periode sesudah event. Olimpiade London berhasil dengan kampung atlet olympicnya, yang mengubah daerah kumuh menjadi daerah yang bergengsi.

Kemudian fasilitas yang sudah dibangun, stadionnya itu langsung dibeli oleh salah satu klub di kota London. Sehingga tidak lagi menjadi beban, tapi sudah menjadi pemasukan dari kota. Kemudian *olympic village* kemudian dikonversi jadi rumah masyarakat biasa. Artinya ya dijual untuk rumah masyarakat. Kemudian yang lain fasilitas yang lain terutama yang berbentuk *auditorium*/stadion tertutup dipakai untuk konser musik dan sejenisnya.

Jadi dari situ kita juga melihat bahwa kita ingin paska Asian Games ini orang akan tetep ingat bahwa Jakarta akan menjadi seperti ini karena Asian Games. Memang agak berbeda dengan tahun 1962. Karena tahun '62 itu secara dampak lebih mendasar dan besar karena banyak yang dibangun baru, sehingga mengubah total Jakarta maupun Indonesia.

Apa yang bisa didapatkan dari momentum Asian Games ke-18 bagi Indonesia?

Justru kita harapkan momentum Asian Games ini menjadi momen perbaikan prestasi olahraga Indonesia. Kenapa, karena sekarang tempat latihannya lebih banyak dan lebih berkualitas. Kalau nggak ada Asian Games, saya kurang yakin akan ada perbaikan serius. Kalau kita lihat Senayan, masih banyak fasilitas yang dari sejak tahun '62 mungkin tidak pernah diapa-apakan. Tapi sekarang, gara-gara Asian Games ini dibutuhkan tempat dan fasilitas baru. Kalau saya melihat Senayan sekarang itu sudah baru sama sekali. Artinya dari segi penataan kota menjadi lebih baik. Jadi ya nggak malu-maluin untuk kota sebesar Jakarta dan untuk negara sebesar Indonesia.

Kedua, menjadi momen untuk perbaikan prestasi olahraga yang ke depan yang sifatnya mendasar. Tidak hanya sekedar mendatangkan pelatih asing atau mengirim atlet Indonesia ke luar negeri, tapi lebih mendasar, ada fasilitasnya. Sehingga baik calon atlet maupun atlet itu bisa berlatih dengan benar, sehingga pelatihnya pun juga bisa memberikan perhatian yang benar.

Teks Dianita Suliastuti



Andin Hadiyanto, Direktur Eksekutif Bank Dunia

Foto Arfindo Briyan Santoso

Voyage to Indonesia: Pembangunan Manusia dan Fintech

Oktober 2018 mendatang, Indonesia akan menjadi tuan rumah pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia. Ajang ini merupakan kesempatan besar bagi Indonesia untuk unjuk diri sebagai negara yang aman, stabil, dan layak investasi. Andin Hadiyanto, Direktur Eksekutif Bank Dunia membagikan pandangannya seputar pentingnya pertemuan tersebut bagi pembangunan dunia.



Kualitas manusia ditentukan oleh 1.000 hari pertama kehidupannya.

Foto
Anas Nur
Huda

Bagaimana Anda melihat persiapan Indonesia untuk menjadi tuan rumah?

Pertemuan tahunan di Bali ini merupakan momentum yang sangat bagus bagi Bank Dunia dan Indonesia. Bank Dunia perlu memperkuat diri dengan jalan menambah modalnya. Hal tersebut nanti akan disepakati di pertemuan ini. Harapannya, peran Bank Dunia terhadap perkembangan dan pembangunan ekonomi global akan menjadi lebih kuat.

Nah, Indonesia terpilih menjadi tuan rumah dari 8 negara yang melamar pada tahun 2016. Itu artinya kita sudah dipercaya. Tidak mudah mendapatkan kepercayaan itu. Saya lihat, persiapan pemerintah sudah semakin matang. Pak Luhut dan Bu Sri Mulyani juga sempat datang ke Washington DC untuk berkomunikasi secara intensif dengan manajemen dan semua Direktur Eksekutif

Bank Dunia. Kami semua sangat mengapresiasi persiapan yang dilakukan oleh Indonesia.

Apa saja hal yang akan dibahas pada pertemuan tersebut?

Meski Bank Dunia bekerja pada semua sektor, namun pertemuan tahunan ini akan lebih mendalami investasi modal manusia. Selama 60 tahun, Bank Dunia lebih sering membahas pembangunan fisik. Misalnya jalan, pembangkit tenaga listrik, atau pelabuhan.

Mengapa investasi modal manusia? Sebab, belum banyak negara yang sadar bahwa jika kita gagal membangun manusia dampak negatifnya akan sangat besar. Mereka tidak tahu cara mengukurnya. Kalau bangun jalan atau pelabuhan, menghitung hasilnya gampang. Berapa kapal yang mampir, berapa barang yang diangkut. Tapi kalau kita investasi di pembangunan manusia, misalnya melalui pendidikan, bagaimana cara mengukurnya?

Nah, di pertemuan tahunan nanti, Bank Dunia akan meluncurkan Indeks Modal Manusia. Selama 15 tahun terakhir, Bank Dunia sudah membuat indeks kemudahan berusaha, *kan?* Indeks tersebut telah menghasilkan sekitar 3.180 lebih reformasi regulasi. Peningkatan antarnegara ini bagus untuk mendorong peningkatan kualitas.

Indeks Modal Manusia tidak hanya mengukur anak usia sekolah tetapi juga usia dini. Kadang-kadang kita lupa investasi yang sangat penting itu justru di 1.000 hari pertama, dimana otak berkembang sangat pesat.

Selain itu, ada juga investasi di tempat kerja. Belum tentu orang lulus sekolah atau kuliah langsung kerja, *kan?* Hal ini sering kita lupakan dan serahkan begitu saja kepada pemberi kerja. Sebenarnya kita perlu melekatkan dunia pendidikan dan dunia kerja agar lebih produktif. Banyak sekali jenis-jenis pekerjaan baru yang selama ini belum diajarkan di bangku kuliah. Ketertinggalan ini perlu kita kejar dan antisipasi.

Investasi modal manusia juga sudah terbukti hasilnya. Singapura dan Korea berhasil melompat dari negara berkembang menjadi negara maju karena investasi modal manusia. Bukan hanya sekolah, tetapi juga kesehatan, sanitasi, pendidikan, dan lain sebagainya.

Bagaimana dengan fokus Indonesia untuk membangun infrastruktur? Apakah sudah tepat?

Begini, baik Indonesia maupun Bank Dunia fokus pada infrastruktur dan pembangunan manusia. Jadi, pembangunan infrastruktur dan modal manusia itu satu paket, dilakukan

bersamaan, tidak bisa gantian. Hanya masalah porsinya saja yang harus diatur.

Ada infrastruktur yang dibangun untuk modal manusia, misalnya air bersih dan sanitasi. Jadi, jangan dipertentangkan antara pembangunan infrastruktur dengan pembangunan manusia. Dalam hal ini Bank Dunia dan Indonesia satu visi. Pemerintah mungkin lebih fokus pada infrastruktur milik umum seperti untuk kesehatan dan edukasi. Nah, untuk infrastruktur seperti jalan, bisa BUMN yang mengurus supaya lebih sehat dan efisien.

Bagaimana menyiapkan kesejahteraan penduduk usia senja?

Jadi, investasi untuk usia 1.000 hari pertama itu, akan mempengaruhi seseorang seumur hidupnya. Sekarang, banyak negara yang mempunyai masalah penduduk usia tua. Hal tersebut harus diatur sedemikian rupa. Jika ada keamanan sosial, masa muda harus dimanfaatkan, bayar pajaknya harus bagus. Dengan begitu, kita bisa menyiapkan sistem keamanan sosial, termasuk sistem pensiun universal.

Saat ini kan baru PNS saja yang aman sampai tua. Jika ada sistem pensiun universal, setiap orang usia produktif sudah bisa berinvestasi atau membayar iuran pensiun untuk dirinya sendiri. Jadi, bukan menggunakan sistem alokasi anggaran seperti untuk pensiunan PNS.

Kita sedang bekerja ke arah sana. Tetapi kita harus hati-hati agar hitungannya benar sehingga tidak membebani negara dan malah memicu krisis. Sistem pensiun universal bisa meniru BPJS Kesehatan. Kalau BPJS tidak diatur, bocornya pasti banyak, negara bisa bangkrut.

Jadi, regulasinya harus rapi, agar tepat sasaran dan yang menikmati adalah

benar-benar yang berhak. Negara tidak punya uang banyak. Kalau kita sudah memberikan akses untuk hal-hal yang sifatnya sosial, biasanya akan susah menariknya lagi. Contohnya subsidi BBM. Karena itu, jika kita ingin memberikan sistem pensiun universal, kita juga harus hati-hati.

Selain pembangunan manusia, apalagi yang menjadi prioritas?

Pertemuan tahunan nanti juga akan membahas Financial Technology atau Fintech. Di satu sisi, perubahan teknologi membuat banyak orang kehilangan pekerjaan karena tenaga manusia digantikan oleh mesin. Namun, di sisi lain, teknologi juga menawarkan banyak peluang pekerjaan baru.

Fintech, akan kita manfaatkan untuk mempercepat inklusi finansial dan mendorong transaksi non tunai. Contoh yang populer adalah membeli makanan melalui aplikasi daring menggunakan uang elektronik. Banyak orang juga bisa menawarkan jasanya secara daring kepada siapapun yang mau menggunakannya, *kan?* Jadi, manfaat Fintech sangat besar bagi pemberantasan kemiskinan dan pemerataan kemakmuran.

Seperti apa dinamika kerjasama Indonesia dan Bank Dunia?

Bank Dunia sudah konsisten membantu Indonesia dari dulu. Wilayah Nusa Dua yang kini menjadi salah satu ikon Bali, desain dan pembangunannya dibantu oleh Bank Dunia. Pada era orde baru, Bank Dunia banyak membantu membangun bendungan, jalan, dan bangunan lain. Makin ke sini, isunya semakin kompleks, mengenai modal manusia. Misalnya saja urbanisasi.

Kerjasama Indonesia dengan Bank Dunia bukan semata soal pendanaan,

tetapi juga keahlian dan konsultasi. Jadi, Bank Dunia memiliki program pertukaran pengetahuan antarnegara yang bisa diakses. Apalagi posisi Indonesia sudah mulai bergeser ke arah yang lebih berkembang, tidak lagi tergolong negara miskin.

Lalu, sekitar 2-3 tahun terakhir Bank Dunia mulai melakukan reformasi, antara lain desentralisasi. Sudah banyak kebijakan yang tidak harus menunggu arahan dari kantor pusat Bank Dunia di Amerika karena banyak isu yang spesifik di negara tertentu. Jadi, Direktur Bank Dunia di masing-masing negara punya beberapa kewenangan. Pegawai Bank Dunia juga diharapkan lebih responsif terhadap klien.

Apa keuntungan Indonesia sebagai negara penyelenggara pertemuan tahunan?

Selain citra Indonesia menjadi semakin baik, kita juga mendapat keuntungan langsung dari sekitar 20 ribu delegasi yang akan datang. Belum lagi jika dihitung dengan biaya hidup yang dihabiskan delegasi di sini jika mengajak keluarga dan memperpanjang waktu kunjungannya.

Selain itu, akan ada banyak acara sampingan. Meski kesepakatan-kesepakatan di dalamnya tidak bisa langsung kita ukur, namun akan ada dampak positifnya bagi Indonesia. Jadi, jangan dihitung bagaimana pemerintah dapat uang dari situ. Acara ini bukan untuk kepentingan pemerintah, tapi untuk kepentingan masyarakat.

Saya lihat, masyarakat juga antusias. Sektor swasta yang ingin mengadakan acara sampingan bisa memanfaatkan kehadiran delegasi resmi maupun negara lain, tapi juga dari bisnis. Mungkin pengukurannya agak susah, tapi menurut saya signifikan.

Teks Irma Kesuma

KPPN Gorontalo

Terus Berinovasi Dalam Semangat Transformasi



Menjadi kantor berprestasi di tengah segala keterbatasan yang harus dihadapi di daerah tak semudah membalik telapak tangan. Namun semangat kerja yang dicurahkan seluruh pegawai KPPN Gorontalo membuktikan bahwa hal tersebut bukan hanya mitos belaka.

Gorontalo adalah provinsi ke-32 di Indonesia. Dulu wilayahnya masuk bagian Sulawesi Utara. Pada tahun 2000, daerah yang terletak di tengah Semenanjung Minahasa ini dimekarkan menjadi provinsi baru. Tak heran jika pembangunan di segala bidang masih terus dilakukan di kawasan yang membentang di sisi utara Teluk Tomini ini.

Untuk mengawal pertumbuhan salah satu provinsi termuda di Indonesia ini, negara hadir melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Gorontalo. Wilayah kerjanya meliputi Provinsi Gorontalo, termasuk Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Bone Bolango.

Keberadaan KPPN Gorontalo telah melalui sejarah panjang dan perubahan organisasi yang beragam sejak tahun 1966. Tak heran jika peran yang dijalankan kantor ini sangat strategis. Terutama dalam memberikan pelayanan terkait pencairan dana APBN, penatausahaan penerimaan negara, dan penyusunan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban APBN.

Penghargaan Tertinggi dari Presiden RI

Angin perubahan di kantor ini mulai terasa

seiring diterbitkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Dari Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) menjadi KPPN. Yang semula lebih kepada pengurusan administrasi seluruh satuan kerja, berubah fungsi menjadi pengurusan komptabel selaku Kuasa Bendahara Negara di daerah. Reformasi Birokrasi yang digalakkan oleh Menteri Keuangan sejak tahun 2007 pun turut mendorong kantor ini untuk terus berbenah, khususnya dari segi pelayanan terhadap *stakeholders*.

Era digital yang menuntut efektifitas dan efisiensi ini, disambut KPPN Gorontalo dengan sigap. Usaha tersebut diawali dengan pembuatan grup *Telegram* (aplikasi *messenger* instan) "Solusi Pasti". Langkah sederhana itu disusul dengan inovasi yang lebih serius dengan diluncurkannya aplikasi 'Mini KPPN' yang bisa diakses di *smartphone*. Inovasi yang memudahkan tersebut sangat diapresiasi *stakeholders*. Alasannya sederhana saja, terobosan ini dinilai dapat mempersingkat waktu dan menjembatani masalah jarak yang dihadapi satuan kerja yang terletak jauh dari pusat kota.

Keuletan jajaran pegawai di KPPN Gorontalo dalam memberikan pelayanan terbaik bagi para



Gedung KPPN Gorontalo.

Totok Suyanto, Kepala KPPN Gorontalo.

Beberapa fasilitas di KPPN Gorontalo yang merupakan implementasi kebijakan di lingkungan Kementerian Keuangan.

Foto Arfindo Briyan Santoso



stakeholders sedikit demi sedikit membuahkan prestasi. Pada tahun 2010, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengganjarnya dengan sebuah penghargaan terbaik sebagai instansi pemerintahan yang menjalankan reformasi birokrasi tingkat Gorontalo. Bahkan di tahun yang sama, kantor ini berhasil menyabet Piala Citra Pelayanan Prima yang dianugerahkan langsung oleh Presiden.

Capaian lain yang juga merupakan buah dari usaha keras dari pegawai adalah dengan diraihnya ISO 9001:2008. Adanya sertifikasi tersebut menunjukkan bahwa pelayanan dari KPPN Gorontalo telah memenuhi standardisasi internasional dalam hal manajemen penjaminan mutu. Tak berhenti di situ, kantor ini bahkan sudah mengatur langkah untuk memulai proses pengajuan sertifikasi internasional tahap berikutnya.

Terdepan Jadi Percontohan

KPPN Gorontalo merupakan salah satu dari 37 KPPN Percontohan tahap pertama yang sudah dioperasikan di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) sejak 30 Juli 2007. Untuk bisa terus menjadi kantor yang bersih dan

melayani, perlu dilakukan terobosan-terobosan agar terus jadi yang terdepan.

"Inovasi tidak harus berupa teknologi yang tinggi, ide sederhana asal dapat membantu dan memudahkan semua pihak itu sudah cukup," ucap Totok Suyanto, Kepala KPPN Gorontalo. Pria yang akrab dipanggil Totok ini berpendapat bahwa teknologi tinggi kurang terasa manfaatnya jika tidak dapat dirasakan banyak pihak. Pihaknya selalu memastikan bahwa seluruh stafnya bisa bekerja sebaik mungkin. Memberikan pelayanan optimal dari *front office* hingga *back office* sesuai pedoman mutu yang telah ditetapkan

Pelayanan yang baik pun tidak akan maksimal terasa dampaknya jika tidak disertai fasilitas yang memadai. Secara berkala dilakukan pembangunan dan perbaikan untuk melengkapi fasilitas yang disediakan. Tidak hanya asal dibangun, semuanya merupakan representasi kebijakan yang diterapkan di lingkungan Kementerian Keuangan. Salah satu yang menonjol adalah fasilitas pendukung kebijakan pengarusutamaan gender (PUG) berupa *kid's corner*, ruang laktasi, dan parkir khusus perempuan.

Dari inovasi-inovasi yang dicurahkan inilah KPPN Gorontalo berhasil menduduki peringkat tiga besar Penilaian Kantor Terbaik di lingkungan DJPb. Posisi tersebut merupakan bentuk determinasi seluruh pegawai yang ingin terus berbenah. Di tahun sebelumnya, kantor tersebut hanya mampu bertengger di peringkat empat. Karena capaian tersebut, kantor ini berhak dinominasikan menjadi salah satu kandidat calon peraih gelar Kantor Terbaik di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2018. Saat ini proses penilaiannya sedang memasuki tahap akhir.

Tak Lupa Hargai Pegawai

Kunci keberhasilan KPPN Gorontalo untuk terus mengukir prestasi adalah jajaran pegawainya yang gigih berkontribusi. Kekuatan SDM ini harus terus dijaga semangatnya. Untuk itu, Kepala KPPN Gorontalo mengadakan berbagai aktivitas ekstrakurikuler sebagai sarana membangun kedekatan personal dengan 22 punggawanya. Dirinya pun aktif mengikuti beragam kegiatan seperti olahraga bersama dan bermusik dengan membentuk band "Adoh Yo Band". Nama dalam bahasa Jawa yang unik itu mencerminkan kondisi mayoritas pegawai yang merantau jauh dari keluarganya demi mengabdikan pada negeri ini.

Kepala Kantor yang berasal dari Pati ini juga menanamkan *value* keterbukaan komunikasi dengan para stafnya. Dirinya berharap agar masalah apapun bisa dikomunikasikan sehingga dapat bersama-sama dicarikan solusinya. "Komunikasi akan mencairkan segalanya. Apapun permasalahannya bisa diatasi dengan komunikasi yang baik," ungkapnya.

Ke depannya, KPPN Gorontalo ingin terus menjaga semangat untuk berinovasi dan bertransformasi. Tantangan akan selalu ada, namun solusi pasti juga terus menyertai. "Mungkin sekarang mereka (*stakeholders*) puas, tapi belum tentu di tahun depan mereka menerima apa yang sudah kita punya. Rasanya kok sia-sia jika kita berhenti bertransformasi!" tegas Totok menutup sesi wawancara sore itu.

Teks Dimach Putra



Yang Muda Yang Berkarya

Subandono

Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan,
Sekretariat DJPK

Tubuh tinggi dan kurus itu berpamitan ke ayah dan ibunya. Pagi itu, ia harus berangkat untuk menempuh pendidikan kedinasan di kampus Sekolah Tinggi Akuntansi Negara di Jurangmangu untuk mengejar impiannya. Selain ingin mengabdikan dan berkontribusi kepada bangsa dan negara, ia juga terinspirasi dari sosok sang ayah yang merupakan purnatugas pegawai negeri. Ayahnya menyarankan dirinya agar masuk sekolah kedinasan karena sempat merasa khawatir tidak mampu membiayai kuliahnya hingga tamat. Bahkan sang ayah lah yang mencarikan tempat tinggal sementara dan membayar biaya sewanya hingga akhir tahun. Tujuannya agar anaknya dapat fokus untuk belajar tanpa khawatir membayar uang sewa.

Foto
Resha Aditya



Subandono bersama jajaran Bagian Perencanaan dan Keuangan DJPK

Foto Dok.Pribadi

Hasilnya, sang anak pun berhasil menyelesaikan pendidikannya hingga menembus gelar master dan doktor di bidang ekonomi dari Universitas Paris I Pantheon-Sorbonne. Ia pun dinobatkan sebagai doktor termuda di instansinya. Bahkan, kini ia juga menjabat sebagai eselon III termuda. Ialah Subandono yang saat ini menjabat sebagai Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).

Muda bukan berarti tak boleh memimpin. Bahkan birokrasi sekelas Kementerian Keuangan pun kini melihat kapasitas kepemimpinan tidak hanya dari aspek umur saja. Sebagai generasi muda, ia ingin membawa perubahan dan terobosan di lingkungannya. Untuk mencapai hal itu, ia tidak menyalahkan kesempatan untuk membimbing sebaik-baiknya tim khusus Subbagian Harmonisasi Kebijakan dan Peraturan. Salah satu tujuan tim ini adalah membantu menyusun terobosan dalam proses bisnis yang ada agar lebih efektif dan efisien. Hasil kepemimpinannya pun menunjukkan hasil yang positif dengan menciptakan pemimpin-pemimpin baru. Terbukti, banyak calon nama-nama promosi yang berasal dari unit yang dipimpinnya.

Membawa pembaharuan

Sebagai pejabat eselon tiga yang termuda, ia merasa perlu melakukan berbagai macam terobosan-terobosan yang bisa dikembangkan di DJPK. Hal itu menjadi penting karena para pimpinan dan Menteri Keuangan sendiri juga mengharapkan adanya inovasi baru yang mendukung pola kerja di Kementerian Keuangan. Menangkap pesan tersebut, ia pun menginisiasi inovasi

di bagian perencanaan dan keuangan DJPK.

“Sebagai contoh, saya sekarang di bagian perencanaan dan keuangan. Dalam menyusun anggaran biasanya hanya *baseline* tahun sebelumnya dan tahun sebelumnya lagi. Saya coba kembangkan, di sini belum pernah ada, di Kementerian Keuangan juga belum pernah ada. Saya mencoba mengembangkan *e-Government* terkait dengan perencanaan, *e-Planning*, bagaimana merencanakan suatu kegiatan dan anggarannya. Saya tidak mau perencanaan secara manual dan tidak berbasis kinerja, kemudian kita coba kembangkan penganggaran secara kinerja menggunakan *e-Budgeting*,” ujarnya.

Yang kedua adalah, ia juga ingin agar penganggaran di DJPK memiliki tema anggaran sendiri setiap tahunnya. Hal itu menjadi penting mengingat perlunya penyeragaman tujuan kegiatan dari berbagai Direktorat teknis yang ada agar saling bersinergi dan fokus. Lebih jauh lagi, hal itu akan menghindari adanya anggaran kegiatan yang tumpang tindih atau tidak fokus. Contohnya, tahun ini ia mencoba untuk mengangkat tema ‘Reformulasi Kebijakan Hubungan dan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, serta Penguatan Kapasitas Pemerintah Daerah Menuju Kualitas Belanja Daerah yang Efisien, Efektif, dan Produktif’.

“Jadi nanti otomatis dari Direktorat Dana Perimbangan dia juga akan fokus. ‘Oh kegiatan yang saya ini, kemudian ini’. Jadi sudah ada arah ke sana. Selama ini *nggak* ada, *scatter* saja. Kan sesuai dengan arahan Bu Menteri kita ingin Kementerian Keuangan ditunjukkan dapurnya kepada publik. Apa sih yang dikerjakan Kementerian Keuangan. Nah kita coba tunjukkan seperti itu dengan mengarahkan Direktorat bekerja sesuai dengan fokus target yang ingin dicapai pada tahun itu oleh DJPK,” terangnya.

Kepemimpinan demokratis

Dalam memimpin bawahannya yang mayoritas kaum milenial, ia selalu menerjemahkan kepemimpinan sebagai cara berpikir, cara beraksi, dan cara berkomunikasi pemimpin dengan yang dipimpin. Menurutnya, sosok pemimpin itu tidak hanya memerintah. Pemimpin memiliki fungsi memberikan dorongan kepada bawahannya agar mengeluarkan kemampuan terbaiknya.

“Makanya setiap saya meminta tolong jajaran saya, saya punya prinsip BCB. Pertama mohon dikerjakan dengan ‘Benar’. Benar dalam artian lihat regulasinya, lihat SOP-nya, lihat proses bisnisnya, apakah sudah benar baru silakan bekerja. Yang kedua kerja dengan ‘Cepat’. Sudah tahu proses bisnis seperti apa, SOP-nya seperti apa ya kerjakan dengan cepat. Dari yang tadinya 2 hari karena baru belajar, sekarang bisa sehari atau setengah hari. Yang ketiga adalah kerja dengan ‘Briliant’. Sudah bisa tahu benar, sudah bisa cepat, *nah* sekarang bagaimana ide-ide yang ada dalam diri mereka dikeluarkan agar ada hal-hal baru yang bisa ditambahkan sebagai *value added* output dari unit ini,” jelasnya.

Di samping itu, ia juga melibatkan bawahannya dalam mengambil keputusan. Ia merasa kepemimpinan otoriter tidak akan membuat organisasi menjadi lebih baik. Dengan prinsip demokratis, ia mencoba untuk menawarkan pekerjaan kepada bawahannya. Apabila tidak ada yang sanggup, ia baru menggunakan kewenangannya untuk mendelegasikan pekerjaan.

“Kalau dalam diri saya sepanjang saya bisa mengerjakan sendiri, saya upayakan mengerjakan sendiri. Tapi kalau memang sulit, karena banyak hal lain yang harus dilakukan, saya terpaksa mendelegasikan dengan cara demokratis,” terangnya.

Dukungan orang tua

Berbagai keberhasilan tersebut tak lepas berkat dukungan dan doa dari sang orang tua. Sang ayah, Poniah Rachmat Yusuf, selalu berpesan agar menjaga setiap amanah yang diberikan. “Orang tua selalu bilang kepada saya, kalau bekerja itu, pertama jaga amanah, itu yang paling penting. Jagalah amanah. Kemudian jadilah orang yang rendah hati. Jangan sampai kamu banyak bicara tapi tidak ada isi. Itulah yang selalu diterapkan oleh orang tua saya kepada saya,” ungkapnya.

Di sisi lain, sosok ibu, Siti Chotidjah, selalu hadir dalam setiap kesulitan yang dihadapi dirinya. Ibunya selalu memperhatikan dan memenuhi kebutuhannya walaupun tidak ia minta. Bahkan, dirinya sempat lebih banyak diam karena merasa tidak ingin merepotkan ibunya. Meski demikian, doa-doa ibunya selalu diijabah Yang Kuasa.

“Pernah saya misalnya lagi keluar rumah itu ditanya ‘Mau ke mana? Saya bilang, ‘Mau ke Amerika’. ‘Aamiin ya Allah mudah-mudahan terwujud’, kata ibu. Alhamdulillah, ternyata doanya benar”, kenangnyanya.

Keluarga

Tantangan pekerjaan yang semakin dinamis menjadi tantangan tersendiri membagi waktu dengan keluarganya. Ia sempat harus selalu siap setiap pagi karena di saat itu ia sering diandalkan untuk penugasan dari atasan. Namun demikian, ia selalu memanfaatkan waktu luang yang ada untuk berkomunikasi dengan istrinya, Reni Mutia, dan bermain bersama ketiga anaknya, Darreno, Revino, Nouvelino.

Saat ini, ia juga berusaha untuk menyempatkan jalan-jalan di akhir pekan bersama keluarga. Yang menarik, ia hampir selalu menggunakan waktu makan siang untuk menelepon sang istri. Hal itu sudah menjadi tradisi baginya sedari

masa kuliahnya di Perancis karena di saat itulah ia memiliki banyak waktu luang untuk berkirim kabar dengan istri.

Harapan

Secara pribadi, Subandono memiliki harapan khusus agar dapat memberikan ilmu yang dimilikinya kepada siapapun yang ingin membangun Kementerian Keuangan dan bangsa Indonesia pada umumnya.

“Saya ingin mengajar kepada teman-teman yang lain, tidak hanya pada internal Kementerian Keuangan tapi juga pengen ke kampus-kampus. Sayang ilmu saya bila tidak ditransfer. Ilmu disimpan sendiri *nggak* akan berkembang. Itu yang saya belum bisa lakukan. Saya belum bisa menjadi fasilitator ataupun pengajar untuk orang-orang di luar Kementerian Keuangan,” harapnya.

Kemudian terhadap institusinya bekerja, ia berharap lebih banyak ada agen perubahan yang berasal dari anak muda. “Orang-orang muda itu sebagai agen perubahan. Sebagai agen pembaharuan perlu dibimbing supaya mereka bisa mencapai apa yang sudah dituju oleh Kementerian Keuangan dalam visi dan misinya. Caranya dengan menggunakan *tools* yang sudah ada yaitu nilai-nilai Kementerian Keuangan. *Nah* terus jalannya bagaimana? Jalannya tadi itu, bahwa jangan segan-segan untuk terus motivasi diri setiap hari, *terus*. Karena itu seperti mandi, perlu diperbaharui. Karena hanya dengan itu kita bisa memanfaatkan setiap peluang yang muncul. Peluang ada karena kita yang mengusahakan sendiri. Begitu peluang ada ya jangan ditinggalkan, tapi kita kelola itu. Itu yang penting,” pesannya.

Teks Abdul Aziz

Perekonomian Indonesia dalam data-data yang dirilis di bulan Juli 2018 menunjukkan perkembangan yang cukup positif

Foto Resha Aditya

Bauran Kebijakan Menjadi Alat Penting

“Kenaikan suku bunga acuan, cepat atau lambat, akan diikuti oleh kenaikan suku bunga kredit, sehingga diperlukan stimulus lain yang dapat membantu perekonomian.”

Ekspor tumbuh positif

Kinerja neraca perdagangan sedikit mencerminkan perbaikan. Secara total, neraca perdagangan per Juni 2018 membukukan surplus dengan nilai ekspor melebihi nilai impor sebesar USD1,74 miliar. Surplus ini sebagian besar disumbangkan oleh surplus neraca nonmigas, yang terdiri dari neraca manufaktur dan lainnya, sebesar USD2,14 miliar. Hal ini berindikasi baik, Sebab, dalam beberapa bulan sebelumnya, neraca non migas pada April dan Mei 2018 menunjukkan nilai negatif. Hal ini berbeda dengan tiga tahun terakhir yang selalu bernilai positif. Namun demikian, neraca migas yang masih mengalami defisit sebesar USD400 juta menahan perbaikan neraca perdagangan

secara keseluruhan.

Dari sisi pertumbuhan, meski sedikit melambat dari bulan sebelumnya, ekspor tumbuh cukup positif sebesar 11,47 persen (yoy). Namun pertumbuhan impor yang negatif juga membantu performa neraca perdagangan bulan Juli 2018. Mengingat di bulan sebelumnya melonjak naik, kontraksi impor yang cukup “tiba-tiba” ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Diantaranya berakhirnya persiapan HKBN, yaitu Ramadan dan Idul Fitri. Hal ini terlihat pada kontraksi impor barang konsumsi sebesar -41,85 persen (mtm).

Selain barang konsumsi, impor barang modal juga tumbuh negatif. Periode aktivitas industri yang berkurang dikarenakan libur lebaran juga telah menyebabkan impor barang modal dan bahan baku berkontraksi masing-masing sebesar -37,81 persen dan -35,21 persen (mtm). Namun secara kumulatif, impor terutama barang modal masih positif, sehingga diperkirakan dapat menopang aktivitas ekonomi di semester kedua 2018.

Ketidakpastian Pasar Keuangan Global Berlanjut

Saat aktivitas perdagangan menunjukkan perkembangan positif, gejolak pada stabilitas eksternal berlanjut dari bulan-bulan sebelumnya. Hal ini ditunjukkan dengan masih melemahnya Rupiah terhadap Dolar AS sebesar 6,48 persen (ytd) pada 19 Juli 2018. Pelemahan Rupiah seiring dengan perbaikan neraca perdagangan yang berlangsung lambat di tengah fluktuasi di pasar keuangan global.

Pasar keuangan global masih terus dibayangi oleh kekhawatiran terhadap kecepatan kenaikan suku bunga acuan The Fed. Sebagai negara *emerging market*, Indonesia tentu khawatir atas dampak dari kebijakan yang memicu dana asing keluar lebih banyak ini. Fenomena ini tidak terjadi hanya di Indonesia tetapi juga di negara *emerging market* lainnya.

Dari awal tahun hingga 18 Juli 2018, dana asing yang keluar dari pasar modal yaitu saham (SUN) mencapai Rp50,8 triliun, sedangkan dari Surat Utang Negara

masih positif masuk Rp100 miliar. Kondisi ini cukup *concerning*, mengingat di tahun 2013 ketika terjadi gejolak pasar keuangan global yang besar, pasar SUN masih positif sebesar Rp53,3 triliun.

Bank Indonesia (BI) selaku otoritas moneter telah berusaha menghalangi keluarnya dana asing lebih jauh dengan meningkatkan suku bunga acuannya. Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada 19 Juli 2018 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-day Reverse Repo Rate (7DRR) pada 5,25 persen. Dengan dipertahankannya 7DRR di bulan Juli 2018, sejauh ini, 7DRR telah meningkat sebesar 100 basis poin dari awal tahun 2018. Meskipun Rupiah masih berada dalam tren yang bergerak seiring harga dollar AS, kenaikan 7DRR dianggap telah cukup mampu menahan pelemahan Rupiah lebih jauh.

BI sendiri menyatakan bahwa kebijakan kenaikan 7DRR tersebut merupakan langkah antisipatif. Dilakukan guna menjaga daya saing pasar keuangan domestik terhadap perubahan kebijakan moneter eksternal, serta ketidakpastian yang masih tinggi.

Meskipun terjadi kenaikan bunga, kebijakan 7DRR ditopang dengan kebijakan lainnya. Hal ini dilakukan agar tidak serta merta menurunkan likuiditas dalam rangka menopang aktivitas perekonomian. BI dalam tinjauan moneter terkininya menyatakan bahwa intervensi dilakukan di pasar valas dan di pasar Surat Berharga Negara (SBN). Selain itu, kecukupan likuiditas khususnya di pasar uang Rupiah dan pasar *swap* antarbank juga dijaga.

Selain kebijakan terkait pasar keuangan, BI juga menempuh kebijakan untuk menopang sektor riil melalui kebijakan makroprudensial. Mulai efektif pada 1 Agustus 2018, relaksasi Loan to Value Ratio (LTV) pada sektor properti akan dilakukan guna mendorong penyaluran kredit serta menjaga momentum pemulihan ekonomi dan stabilitas sistem keuangan secara umum.

Perhatian terhadap kehati-hatian dan perlindungan konsumen tetap akan dijaga

dalam periode relaksasi ini. Dapat dicatat bahwa sektor properti saat ini masih memiliki *multiplier effect* yang cukup besar terhadap perekonomian nasional. Dengan demikian, sektor properti layak menjadi langkah utama BI dalam menjaga kekuatan ekonomi di tengah serangan terhadap stabilitas.

Selain kebijakan makroprudensial, kebijakan Giro Wajib Minimum (GWM) juga disinergikan sebagai bagian dari bauran kebijakan moneter. Ketiganya, baik kebijakan moneter, makroprudensial, dan GWM tersebut akan berlaku mulai tahun ini.

Risiko dan Kebijakan yang Dibutuhkan

Risiko ke depan kembali berasal dari kondisi eksternal. Selain kecepatan pemulihan ekonomi AS, terutama setelah Juni 2018 yang secara bersamaan meningkatkan urgensi untuk meningkatkan FFR, risiko lain yang membayangi negara kita adalah dampak perubahan kebijakan moneter beberapa negara lain. Diantaranya kebijakan Bank Sentral Uni Eropa (ECB) yang menurunkan program pembelian aset, serta kebijakan Bank Sentral Tiongkok (PBoC) yang menurunkan GWM. Selain faktor kebijakan, harga minyak yang naik, serta ketegangan hubungan dagang AS-Tiongkok, juga menjadi risiko penting yang perlu diukur dengan baik.

Ketidakpastian tersebut dikhawatirkan mendorong penguatan mata uang dolar lebih jauh, sehingga memicu pembalikan modal dari negara berkembang, termasuk Indonesia. Kondisi ini, pada gilirannya, mengharuskan kenaikan suku bunga acuan di dalam negeri, sehingga dapat menimbulkan risiko pada pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung. Terkait hal ini, menurut Gubernur BI pada Juni 2018 lalu, dalam pertemuan pers gabungan bersama Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, OJK, LPS, dan lainnya, kenaikan suku bunga acuan baru akan berdampak terhadap perekonomian dalam 1,5 tahun.

Agar ketidakstabilan global tidak tersalurkan sepenuhnya pada

perekonomian domestik, fundamental harus diperkuat. Saat ini, fundamental ekonomi Indonesia cukup kuat dengan bantalan neraca pembayaran yang relatif baik pada kuartal pertama di tengah penguatan harga komoditas global. Selain itu, harga-harga domestik juga terjaga, sehingga terdapat ruang bagi BI untuk tidak terlalu drastis meningkatkan suku bunga acuan.

Menurut rilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Juni 2018, terjadi inflasi yang cukup terkendali sebesar 0,59 persen (mtm) pada 82 kota di Indonesia. Sementara secara tahunan (yoy) adalah sebesar 3,12 persen. Inflasi ini, menurut pengamatan BPS, merupakan yang terendah dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini mengingat, pada Juni 2018 masih berada dalam pengaruh Hari Raya. Hal ini tercermin pada inflasi Juni dimana porsi inflasi bahan makanan adalah yang tertinggi. Rendahnya inflasi Juni 2018 dapat mempertahankan ekspektasi positif pasar terhadap kemampuan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi untuk menghadapi tekanan dari luar.

Ke depan, diperlukan koordinasi antar-otoritas dalam melakukan bauran kebijakan yang antisipatif guna menghadapi gejolak. Namun, tetap akomodatif terhadap perekonomian. Tujuannya agar Indonesia bisa terus menyelesaikan tantangan-tantangan pembangunan yang ada. Selain itu, beberapa inisiatif khusus harus mulai dilakukan, seperti memperkuat neraca perdagangan barang dan jasa.

Neraca perdagangan terutama dapat diperkuat dengan perbaikan strategi ekspor yang menjangkau *non-traditional market*, serta menerapkan *import timing* yang *smooth*. Sementara dalam meningkatkan neraca jasa, usaha yang dapat dilakukan adalah mendorong kapasitas ekspor penyedia jasa domestik, terutama transportasi. Sebab, kontribusi ekspor jasa angkutan oleh industri domestik pada perekonomian masih rendah.



Andriansyah, Ph.D.
Kepala Subbidang Nilai
Tukar dan Suku Bunga,
Badan Kebijakan Fiskal

Pemulihan ekonomi dan peningkatan laju inflasi di Amerika Serikat (AS) telah memicu percepatan normalisasi kebijakan moneter AS. Antisipasi kenaikan suku bunga FFR yang lebih tinggi telah mendorong kenaikan imbal hasil obligasi AS bertenor 10 tahun menembus level psikologis tiga persen. Hal ini menyebabkan terjadinya pembalikan modal dari negara berkembang kembali ke AS dan menyebabkan pelemahan mata uang negara lain terhadap dolar AS secara luas.

IMF (2017) telah memperkirakan bahwa normalisasi kebijakan moneter AS, baik melalui kenaikan suku bunga acuan maupun pengurangan neraca bank sentral, akan mengurangi aliran dana masuk ke negara berkembang sebesar USD70 miliar dalam dua tahun ke depan. Namun demikian, pengurangan neraca *the Fed* sebesar USD4,5 triliun yang dimulai Oktober 2017 memiliki dampak yang lebih besar dibandingkan kenaikan FFR.

Aliran dana masuk ke negara berkembang yang terjadi sejak 2010 lebih disebabkan oleh tekanan kebijakan moneter tidak konvensional *the Fed*, dibandingkan dorongan daya tarik pasar keuangan negara berkembang. Dengan kata lain, aliran dana masuk ke negara berkembang bukan disebabkan oleh daya saing pasar keuangannya. Namun, lebih karena pemodal asing tidak memiliki banyak pilihan di pasar keuangan negara maju.

Secara teori, hubungan antara aliran dana di pasar keuangan, baik itu saham maupun obligasi, dengan nilai tukar, dapat dijelaskan oleh dua model utama yaitu pendekatan tradisional (Dornbusch & Fischer 1980) dan neraca portofolio (Frankel 1983). Model tradisional mengatakan nilai tukar ditentukan oleh aliran perdagangan, sedangkan dalam model neraca portofolio nilai tukar lebih ditentukan oleh kondisi keseimbangan pasar keuangan.

Dengan mengasumsikan pemodal lebih memilih berinvestasi di negara asal dan terdapat substitusi tidak sempurna antara aset keuangan domestik dan asing, Frankel (1983) berpendapat bahwa pemodal akan menyeimbangkan kembali portofolio mereka, sesuai dengan imbal hasil yang diharapkan dari kedua aset tersebut, diukur dalam mata uang domestik. Dengan rezim nilai tukar mengambang, peningkatan (penurunan) harga aset domestik akan menyebabkan peningkatan (penurunan) dalam permintaan aset tersebut yang kemudian menyebabkan terjadinya aliran masuk modal (arus keluar). Selanjutnya, hal ini akan menyebabkan terjadinya apresiasi (depresiasi) mata uang domestik.

Implikasi penting dari hubungan antara pasar keuangan, aliran dana asing, dan nilai tukar ini adalah, pertama, penting untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika pergerakan nilai tukar untuk membuat kebijakan stabilisasi rupiah berjalan lebih efektif. Kebijakan kenaikan suku bunga acuan ZDRR diharapkan mampu membuat pasar keuangan Indonesia tetap menarik, dibandingkan negara berkembang lainnya.

Kedua, pendalaman sektor keuangan perlu terus dilakukan untuk mengurangi ketergantungan yang tinggi terhadap sektor perbankan. Kenaikan suku bunga acuan, cepat atau lambat, akan diikuti oleh kenaikan suku bunga kredit, sehingga diperlukan stimulus lain yang dapat membantu pemerintah untuk mencapai target pertumbuhan yang lebih tinggi.

Ketiga, perlu memperkuat keterkaitan antara sektor keuangan dengan ekonomi riil, khususnya antara investasi dan pertumbuhan. Misalnya, dana masyarakat yang dihimpun melalui penawaran publik di pasar modal perlu dimanfaatkan untuk kegiatan investasi yang produktif. Andriansyah & Messinis (2016) dan Andriansyah (2017) membuktikan bahwa investasi di aset tetap akan lebih bermanfaat untuk profitabilitas perusahaan publik dibandingkan penggunaan hasil penawaran umum untuk pembayaran utang ataupun pembiayaan modal kerja.

**) Tulisan ini adalah pendapat pribadi dan tidak mencerminkan kebijakan institusi di mana penulis bekerja*

Teks Adelia Pratiwi
Staf Khusus Kepala Badan Kebijakan Fiskal



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

**“LELANG MOBIL
MURAH BANGET,
segera transfer ke rekening saya.”**



Awas, jangan tertipu oleh mereka.

- Tidak pernah ada Down Payment atau DP untuk pembelian objek lelang;
- Uang jaminan lelang selalu disetorkan ke rekening bendahara, bukan atas nama pribadi;
- Apabila menemukan selebaran atau penawaran melalui telepon yang mencurigakan, silakan hubungi contact center kami.

Menata Ulang Sistem Perpajakan Global

John Hutagaol,
Direktur Perpajakan Internasional,
Direktorat Jenderal pajak*)

Pada awal 2017 lalu, para pemimpin otoritas pajak yang berjumlah lebih dari 48 negara serta beberapa lembaga internasional, seperti IMF dan World Bank, berkumpul di Oslo (Norwegia). Mereka berbagi pengalaman guna menyelesaikan permasalahan perpajakan secara global.

Pada pertemuan tersebut, berhasil diidentifikasi dan dikelompokkan hal-hal yang perlu mendapat perhatian dan penyelesaian. Diantaranya perkembangan terkini di bidang teknologi dan dampaknya, semakin marak dan rumitnya praktik *aggressive tax planning*, serta celah-celah perpajakan (*tax loophole*) yang timbul akibat perbedaan kebijakan dan struktur pajak di masing-masing negara (*hybrid mismatch arrangements*).

Para pemimpin otoritas pajak yang tergabung dalam *Forum Tax Administration (FTA)* menyadari, permasalahan pajak secara global (*global tax matters*) tersebut tidak dapat tertangani dengan baik secara sepihak (*unilateral*) maupun secara bilateral. Hal ini perlu diselesaikan secara bersama-sama (*multilateral*). Oleh karena itu, diperlukan kerjasama dan kolaborasi internasional guna membangun kebersamaan dan konsensus global.

Empat variabel

Latar belakang timbulnya permasalahan pajak secara global adalah terjadinya transformasi *landscape* perpajakan internasional. Ada empat variabel yang berpengaruh atas perubahan mendasar pada *landscape* perpajakan internasional. Keempat variabel dimaksud, yaitu globalisasi, teknologi, *underground economy*, dan

pertumbuhan ekonomi dunia.

Variabel pertama adalah globalisasi. Kegiatan perekonomian dunia antarnegara sudah semakin menyatu dan terhubung. Hal ini dikenal dengan *peer to peer economy*. Dalam era globalisasi, interdependensi suatu negara dengan yang lainnya cenderung semakin besar, sehingga dibutuhkan pengaturan yang lebih harmonis dan *uniformity*. Tujuannya mendorong transaksi lintas negara agar semakin bertumbuh dan berkembang, sehingga terwujud kesejahteraan global.

Dalam konteks global, batas-batas suatu negara semakin kabur (*borderless*). Ibarat suatu mata uang koin, sisi lain dari *globalization effect* adalah timbulnya permasalahan pajak. Contohnya yaitu *double taxation* maupun *double non taxation*, *harmful tax practise*, dan *hybrid tax arrangements*.

Variabel kedua adalah teknologi yang memberi dampak luas pada perekonomian global. Terlebih, di era ekonomi digital (*digital economy*) saat ini. Perubahan besar yang ditimbulkan oleh teknologi

juga berdampak pada perubahan mendasar di segala aspek kehidupan manusia, terutama kegiatan ekonomi dan bisnis. Skala dan dampak perubahan tersebut sering disebut *disruption*.

Timbulnya *business model and arrangement* yang baru seperti usaha rintisan (*start-up*), *over the top*, *air bnb*, *financial technology*, *crypto currency*, dan *bit coin*, di satu sisi, memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat. Namun di sisi lain, hal ini dapat mengakibatkan berbagai masalah.

Permasalahan pajak yang timbul di era ekonomi digital adalah bagaimana otoritas pajak (*tax authority*) di suatu negara bisa mengkapitalisasi kemajuan teknologi dalam administrasi perpajakan. Hal ini dapat menekan beban administrasi dalam pelayanan, penyuluhan, dan penegakan hukum perpajakan.

Permasalahan lainnya adalah beban administrasi akan semakin besar dan kompleks dalam



Ilustrasi
Dimach Putra

(*modern tax administration*). Modernisasi tersebut dilakukan guna menghimpun penerimaan pajak seoptimal mungkin. Hal ini diperlukan guna menopang pembiayaan program pemulihan ekonomi (*economic recovery program*), seperti program *fiscal stimulus* dan *bailout*.

Pada 2010, diluncurkan program *Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)* oleh seluruh lembaga keuangan di dunia kepada Pemerintah AS untuk mendorong keterbukaan informasi rekening keuangan (*Transparency of Foreign Account Information for Tax Purposes*). Telah banyak negara yang menandatangani *Inter Governmental Agreement (IGA)* dengan Kementerian Keuangan AS. Selanjutnya, FATCA menginspirasi lahirnya *Common Reporting Standard (CRS)* yang merupakan standar dalam pertukaran informasi secara otomatis (*Automatic Exchange of Information*).

Berhubung hingga kini perekonomian belum pulih sepenuhnya, maka pada 2017 lalu, AS melakukan reformasi pajak (*tax policy reforms*). Tujuannya yaitu untuk memperkuat kebijakan ekonomi dan mengakselerasi pemulihan ekonominya.

Variabel keempat adalah *underground economy*, yaitu kegiatan perekonomian yang tidak tercatat dan terbukukan dalam *Gross Domestic Product (GDP)* suatu negara. Umumnya, *underground economy* timbul dari *illegal logging, fishing and mining, money laundry, human trafficking, and corruption*. Pada kenyataannya, di setiap negara terdapat *underground economy* dengan kisaran 1 persen hingga 20 persen dari GDP-nya.

perekonomian dunia.

Keempat pilar tersebut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dunia. Mereka adalah Amerika Serikat (AS), Tiongkok, Uni Eropa, dan Jepang.

Apabila pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) pada salah satu pilar tersebut mengalami tekanan, hal ini dapat berdampak luas pada pertumbuhan ekonomi global.

Misalnya saja, krisis ekonomi di AS sejak 2008 yang telah mendorong negara tersebut melakukan modernisasi administrasi pajaknya

merespons perubahan perilaku Wajib Pajak (*taxpayer's behaviour*). Selain itu, bagaimana caranya membagi hak pemajakan secara fair, antara negara sumber dan domisili, serta bagaimana membangun keadilan dalam pemenuhan kewajiban pajak antara pelaku usaha *online* dengan konvensional.

Variabel ketiga adalah pertumbuhan ekonomi dunia yang ditopang oleh empat pilar



Underground economy berkaitan erat dengan kepatuhan Wajib Pajak. Tingginya tingkat *underground economy* suatu negara mengindikasikan tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang rendah. Begitupun sebaliknya.

Berdasarkan ulasan di atas, masing-masing variabel memberikan pengaruh yang besar terhadap transformasi *landscape* perpajakan secara global. Perubahan terkini dari *landscape* perpajakan secara global telah menimbulkan permasalahan global bagi otoritas pajak dari banyak negara.

Diantaranya yaitu timbulnya kesenjangan informasi (*asymmetric information*) dan semakin maraknya praktik penghindaran pajak secara agresif (*aggressive tax planning*). Kedua akar permasalahan perpajakan global tersebut bisa mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan (*tax revenue forgone*) dan tergerusnya basis pemajakan (*base erosion*) suatu negara.

Kerjasama internasional

Penyelesaian bersama-sama (*multilateral approach*) diperlukan guna menyelesaikan permasalahan perpajakan secara global. Hal ini dilakukan dalam bentuk kerjasama dan kolaborasi secara internasional (*International cooperation and collaboration*). Hasilnya berupa komitmen dan konsensus global.

Guna membangun kerjasama dan kolaborasi internasional, dibutuhkan keberadaan International Fora, seperti Global Forum on Transparency and Exchange of Information dan Inclusive Framework on BEPS. Hal tersebut sangat efektif untuk menggalang komitmen dan konsensus secara global.

Saat ini, masing-masing anggota negara dari International Fora di atas sedang melakukan konvergensi standar pajak global. Misalnya, seperti CRS dan BEPS deliverables ke dalam ketentuan

peraturan domestiknya. Upaya yang dilakukan oleh masing-masing negara dimaksud merupakan wujud nyata dari komitmen dan konsensus global.

Saat ini, peran International Fora begitu besar dan menentukan arah kebijakan perpajakan global menuju keterbukaan informasi untuk tujuan pajak. Selain itu, International Fora memerangi segala bentuk penghindaran pajak yang dapat menggembosi penerimaan pajak suatu negara.

Respons perubahan landscape perpajakan global

Transformasi *landscape* perpajakan secara global mempengaruhi perubahan yang mendasar pada sistem dan struktur perpajakan global. Hal ini secara langsung mempengaruhi perubahan pada kebijakan dan administrasi di masing-masing negara.

Keberadaan International Fora saat ini diharapkan dapat menjadi mesin penggerak perubahan. Fungsinya bukan saja sebagai wadah komunitas internasional, melainkan juga sebagai lembaga penyusun dan pembuat standar perpajakan global (*global tax standard setter*). Di samping itu, ia juga melakukan *assessment* dan evaluasi atas implementasi standar perpajakan global tersebut.

Perubahan *landscape* perpajakan global telah mendorong otoritas pajak dari banyak negara untuk melakukan pembenahan dan penyempurnaan regulasi pajak maupun administrasinya yang dikenal sebagai *tax reforms*. Ada beberapa negara yang melaksanakan program pengampunan pajak (*tax amnesty*) terlebih dahulu, sebelum menindaklanjutinya dengan reformasi perpajakan.

Ruang lingkup program pengampunan pajak bervariasi antara negara yang satu dengan yang lain. Korea Selatan, India, dan Australia, misalnya, melaksanakan program pengampunan pajak khusus atas pengungkapan harta di luar negeri

yang dikenal dengan sebutan Offshore Voluntary Disclosure Program (OVDP). Sementara Indonesia, pengampunan pajak yang dilakukan mencakup pengungkapan dan repatriasi harta di luar dan dalam negeri. Dengan demikian, program pengampunan pajak dijalankan sebagai program antara, sebelum dilanjutkan dengan reformasi perpajakan.

Reformasi perpajakan yang dijalankan oleh otoritas pajak di banyak negara berguna untuk merespons perubahan terkini atas *landscape* perpajakan secara global. Pembenahan administrasi pajak di Afrika Selatan, misalnya, dimaksudkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan dari kegiatan *cash economy*. Sementara Rusia, Italia, dan Brazil dimaksudkan untuk melakukan pembenahan administrasi PPN.

AS melakukan reformasi pajak pada 2017. Tujuannya untuk mempercepat proses pemulihan perekonomiannya melalui penyempurnaan kebijakan perpajakan. Kebijakan yang dilakukan berupa penurunan tarif PPh Badan menjadi 21 persen, serta mengubah cakupan hak pemajakannya menjadi berbasis territorial.

Indonesia sendiri melakukan reformasi perpajakan pascaprogram pengampunan pajak pada 2017 lalu. Hal ini diperkirakan berlangsung selama beberapa tahun ke depan. Ruang lingkup perubahan meliputi struktur organisasi dan bisnis proses, sumber daya manusia, teknologi, serta regulasi.

Pembenahan administrasi dan regulasi pajak yang dilakukan oleh otoritas pajak, serta semakin besarnya pengaruh dan peran International Fora dalam memformulasi standar perpajakan global, merupakan dampak dari transformasi *landscape* perpajakan global saat ini.

*) *Tulisan ini adalah pendapat pribadi dan tidak mencerminkan kebijakan institusi di mana penulis bekerja*



Konsultasikan masalah Anda agar pelaksanaan belanja barang dan jasa lebih efektif dan efisien, sesuai dengan ketentuan yang berlaku



Gedung Djuanda II, Lantai 9
Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Pusat
10710



konsultasi_pbj@kemenkeu.go.id



(021) 3456545

HELPDESK PENGADAAN BARANG & JASA

Pembuktian Menggugah di Titik Nadir

Keterbatasan diri tak jarang menjadi alasan bagi kebanyakan orang dalam menjustifikasi kegagalan dalam hidup. Namun, tidak dengan Fuad Gandhi Torizal. Baginya, keterbatasan fisik menjadi kekuatan baginya untuk terus maju dan membuktikan, bahwa ada banyak hal yang bisa dicapai dengan kegigihan dan keteguhan hati. Gandhi –demikian dia disapa– adalah dokter gigi sekaligus peneliti yang memperoleh pendidikan doktoral di Universitas Tokyo Jepang, melalui beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Kursi roda menjadi andalan Gandhi untuk bisa melakukan mobilitas. Menurut kedua orangtuanya, sejak berusia kurang dari dua tahun, Gandhi harus menerima kenyataan bahwa kakinya lumpuh akibat malpraktik. Ada banyak rintangan yang dihadapi Gandhi dengan keterbatasan fisik yang dia miliki. Mulai dari dikucilkan, hingga tekanan psikologis akibat perlakuan diskriminatif pendidikan di masa lalu.

Sempat terbersit dalam pikirnya, bahwa melanjutkan cita-cita yang dia impikan, bukan menjadi haknya. Bahkan, Gandhi pernah berada pada kondisi yang paling buruk dalam hidupnya. “Saya sempat berada di suatu titik dimana saya berada dalam depresi tinggi, hingga berpikir bahwa kematian adalah satu-satunya jalan (untuk) mengakhiri penderitaan saya” demikian akunya.

Kepercayaan dirinya membaik saat lulus dari seleksi beasiswa LPDP. “Sejak itu saya menyadari bahwa ketika banyak orang menganggap rendah kekurangan diri saya, yang saya perlu lakukan hanyalah mencambuk mentalitas saya untuk memaksa bagian tubuh yang berfungsi agar memaksimalkan potensi,” ungkapnya.

Kerja keras

Upaya Gandhi dalam merampungkan pendidikan dokter



gigi, memperoleh gelar dokter gigi, hingga bisa praktik sebagai dokter gigi dilaluinya dengan jatuh bangun. Penolakan demi penolakan dari dalam negeri harus diterimanya. Kriteria fisik Gandhi dianggap kurang memadai untuk menjadi tenaga kesehatan. Hingga pada akhirnya kesemuanya diperoleh Gandhi justru di luar negeri, yakni Jepang.

Besar keinginan Gandhi untuk bisa berkontribusi bagi negeri kelahirannya, Indonesia. Hal ini membawa dirinya mengambil program master bioteknologi UGM di samping program spesialis bedah mulut dan maksilofasial yang dijalaninya di Jepang. Gandhi perlu bolak balik Indonesia-Jepang untuk merampungkan pendidikannya ini. Celah untuk bisa berkontribusi bagi negeri juga mulai terbuka baginya dengan menjadi pengajar di salah satu universitas di Yogyakarta.

Lulus LPDP

Gandhi sangat bersyukur dirinya berhasil lulus seleksi beasiswa LPDP, sehingga bisa melanjutkan program doktoral di Jepang. Dia juga mengapresiasi kebijakan terbaru LPDP yang membuka kesempatan lebih luas bagi rekan-rekan difabel di Indonesia. Melalui beasiswa LPDP, Gandhi menggeluti bidang *medical bioengineering* dengan berfokus pada *stem*



Fuad Gandhi

Foto dok. pribadi.

cell dan *artificial organ*.

“Saya ingin mengkombinasikan teknologi kedokteran molekuler berbasis bioteknologi dalam *stem cell screening* serta *tissue engineering* dalam teknologi *organ artificial*,” ungkap pria kelahiran Magelang ini. Dia berharap, teknologi *stem cell* berbasis *artificial organ* dapat terus dikembangkan dengan tingkat keberhasilan yang baik dalam aplikasi klinis, seperti pada transplantasi organ.

Jepang jadi pilihan

Teknologi berbasis *regenerative medicine* dengan menggunakan berbagai jenis *stem cell* memang telah berkembang pesat di Jepang, bahkan telah lolos uji klinis pada pasien. Diakui Gandhi, objek risetnya, yaitu *Induced pluripotent stem cell*, merupakan satu salah satu jenis *stem cell* yang dapat direkayasa secara genetik dari sel tubuh dewasa dan mampu berdiferensiasi menjadi hampir seluruh jenis sel dalam tubuh manusia. Jepang menjadi negara pertama yang berinovasi untuk mengembangkannya dan diadaptasi dunia.

Untuk itu Gandhi memilih Jepang sebagai negara tempat ia menempuh pendidikan doktoral. Alasan lain adalah karena Jepang dikenal sebagai negara yang memiliki disiplin tinggi, kerja keras, dan dedikasi. “Nilai-nilai inilah yang ingin saya pelajari dalam menempa diri untuk dapat lebih beradaptasi dan siap akan tantangan kerja pada masa yang akan datang,” ungkapnya.

Selain itu, Jepang terutama Tokyo, memberikan akses yang ramah bagi para difabel. Tidak hanya memudahkan Gandhi dalam menggunakan fasilitas umum, seperti infrastruktur dan transportasi umum, tetapi juga dalam hal akses pendidikan. Sistem pendidikan di Jepang diakui Gandhi sangat memperhatikan keperluan para difabel.

Untuk itu, Gandhi juga banyak belajar terkait manajemen pendidikan tinggi bagi difabel, sistem pendidikan adaptif, desain fasilitas pendidikan inklusif, dan sebagainya. Dia berharap, hal ini kelak dapat dia bagikan ke tanah air untuk mendukung terwujudnya pendidikan inklusif di Indonesia.

Terkait hal ini, secara praktis Gandhi juga terlibat sebagai *supporting staff* di *barrier free office* di Universitas Tokyo guna mendukung dan menyediakan sarana dan prasarana inklusi bagi civitas akademika difabel. Bersama rekan peneliti dan pelajar di kampusnya, Gandhi juga menginisiasi International Multidisciplinary Engineering Association of The University of Tokyo. Di sela jadwal riset eksperimental yang padat, Gandhi bahkan menyempatkan diri untuk menjadi pembimbing dan pengajar mahasiswa di beberapa perguruan tinggi di Indonesia secara *online*.

Terus bertahan

Kedua orangtua menjadi kekuatan terbesar Gandhi selama ini. Terlebih, saat sang ayah mengalami *stroke* di masa awal pendidikan doktoral. Gandhi pun menjadi tulang punggung keluarga. Tidak heran, dia merelakan sebagian besar *living allowance* yang diterimanya untuk membiayai pengobatan sang ayah, serta membiayai pendidikan kedua orang adiknya yang masih kuliah. Meski tidak mudah, Gandhi tetap bersyukur dan berupaya memberikan yang terbaik bagi keluarga.

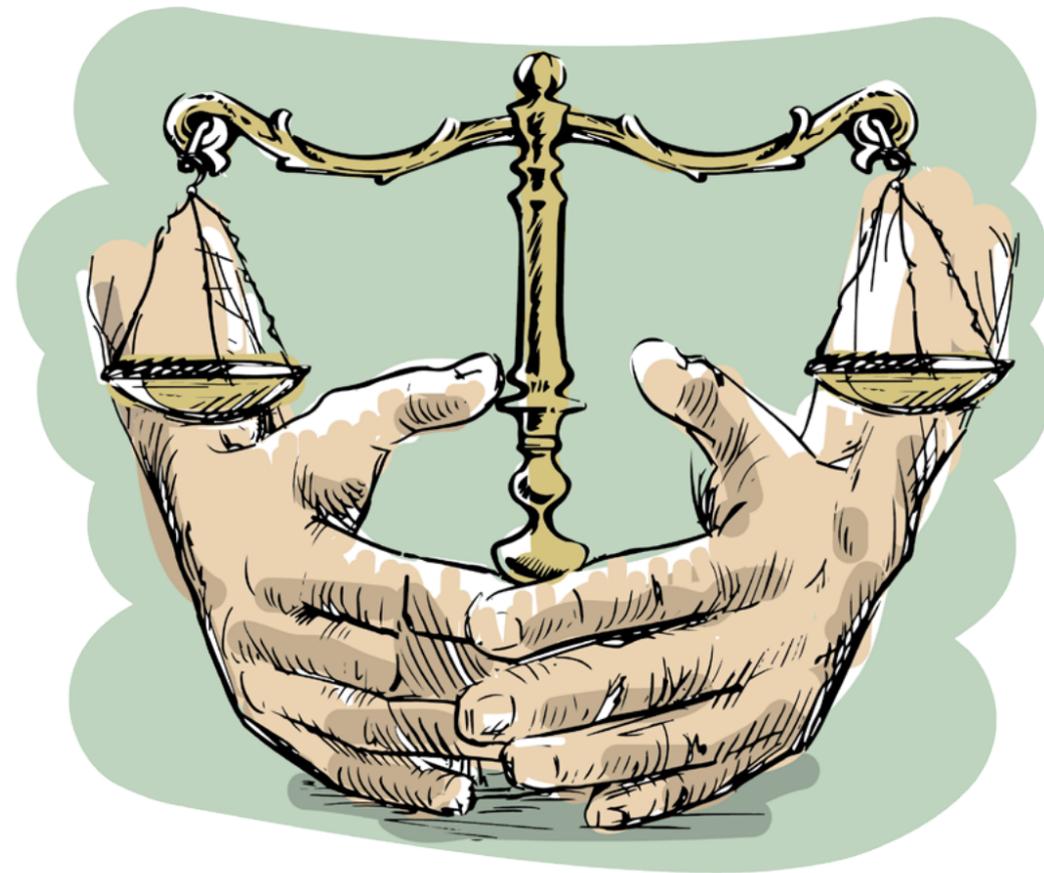
Ke depan Gandhi berharap bisa memiliki andil bagi kemajuan kualitas pendidikan Indonesia, khususnya bagi para difabel. Dia berharap masyarakat Indonesia, juga para pembuat kebijakan menyadari bahwa masyarakat difabel memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk bisa berkarya sesuai dengan bidang yang diminati dan dikuasai.

Gandhi adalah salah satu anak bangsa yang mampu membuktikan, bahwa dengan keterbatasan fisik yang ia miliki, mampu mencapai banyak hal, yang bahkan belum tentu bisa dicapai oleh mereka yang memiliki kesempurnaan fisik.

Teks Farida Rosadi

Menilik Sistem Perbendaharaan yang Ideal

Teks Windraty Siallagan,
Pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan



Ilustrasi
Dimach Putra

Peran fungsi perbendaharaan dalam manajemen fiskal Pemerintah tidak perlu lagi diperdebatkan. Tanpa sokongan perbendaharaan yang mapan, manajemen fiskal pemerintah tidak akan pernah meraih kinerja biru untuk mendongkrak tingkat kesejahteraan masyarakat.

Secara konseptual, fungsi

perbendaharaan meliputi manajemen komitmen dan pengendalian 'dompet publik', manajemen kas, manajemen utang, jaminan dan aset pemerintah, serta akuntansi dan pelaporan. Perkembangan teknologi finansial dan disrupsi digital mensyaratkan adanya perubahan pola kerja baru, penghematan, efisiensi, kecepatan, akses dan kualitas pelayanan perbendaharaan yang lebih baik. Dalam konteks tersebut, pertanyaan yang kerap muncul di era transformasi ini adalah bagaimana desain sistem perbendaharaan yang ideal untuk diterapkan di Indonesia?

Kertas kerja IMF tahun 2005 mengenai Desain Sistem Perbendaharaan memperkenalkan konsep atau analisis rantai nilai. Analisis ini adalah salah satu alat yang dapat digunakan untuk mendesain sistem perbendaharaan suatu negara. Analisis tersebut juga dapat digunakan untuk melihat apakah ada nilai tambah dari masing-masing fungsi utama perbendaharaan dan fungsi pendukungnya (IT, audit internal, kerangka hukum, dan institusi).

Justifikasi atas cakupan sistem perbendaharaan dapat dilakukan dengan melihat apakah terdapat nilai tambah dari masing-masing fungsi perbendaharaan. Fungsi yang tidak menghasilkan nilai tambah -misalnya akibat adanya pengembangan IT- tidak lagi menjadi cakupan suatu sistem perbendaharaan, dan sebaliknya.

IMF menggarisbawahi bahwa setidaknya terdapat empat peran perbendaharaan dalam mendukung pencapaian tujuan fiskal. Pertama, kendali atas makro fiskal. Kedua, kendali atas mikro fiskal. Ketiga, efisiensi alokatif. Serta keempat, efektivitas biaya.

Manajemen anggaran diarahkan pada kendali makro fiskal yaitu terjaganya kesinambungan fiskal melalui kendali atas anggaran agregat seperti tingkat defisit dan utang. Kendali mikro fiskal terkait erat dengan aspek kepatuhan anggaran untuk pelaksanaan belanja.

Efisiensi alokatif terkait erat dengan kondisi dimana sumber daya disalurkan ke area yang memiliki prioritas tertinggi, dan harus dapat direalokasi jika diperlukan. Sementara, efisiensi alokatif terkait dengan biaya menyediakan pelayanan pemerintahan yang optimal dengan biaya yang diminimalisasi.

Sebagai negara berkembang dengan

kondisi ekonomi yang masih rapuh, kapasitas institusi dan SDM yang terbatas, dan dengan masih ditemuinya korupsi serta penyalahgunaan anggaran, Indonesia perlu mendesain sistem perbendaharaan yang menekankan kendali makro dan mikro fiskal. Selain untuk menstabilisasi situasi fiskal, juga untuk memastikan terciptanya kepatuhan anggaran.

Dengan kata lain, desain sistem perbendaharaan cenderung diarahkan pada organisasi perbendaharaan yang tersentralisasi. Artinya, organisasi perbendaharaan melakukan keseluruhan fungsi perbendaharaan dan memiliki wewenang untuk memonitor dan mengendalikan aktivitas perbendaharaan kementerian teknis.

Sebaliknya, negara yang memiliki ekonomi yang stabil dan memiliki tingkat kepatuhan anggaran yang baik, perlu secara bertahap menekankan sistem perbendaharaan pada tujuan-tujuan seperti efisiensi alokatif dan penyampaian layanan yang efektif biaya. Konsekuensinya adalah diperlukan fungsi perbendaharaan yang ramping. Caranya, dengan mendelegasikan sebagian atau bahkan seluruh fungsi perbendaharaan kepada organisasi lain.

Dalam sistem yang dianut Indonesia, fungsi kendali perbendaharaan cenderung terdesentralisasi. Terdapat tingkat relaksasi kendali sentral dan formal dengan atas otoritas manajemen keuangan dan perbendaharaan dari Kementerian Keuangan kepada kementerian teknis. Mekanisme pembayaran sebagai salah satu fungsi utama perbendaharaan misalnya, telah terdesentralisasi kepada kementerian teknis dengan prinsip 'Let the managers manage'.

Namun demikian, keluarnya uang dari kas negara masih memerlukan pengujian oleh Kementerian Keuangan (*ex-ante check*) yang dalam hal ini dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dengan penerbitan SP2D.

Hal tersebut berbeda dengan model *Anglo-Saxon* dan negara maju lainnya dimana Kementerian Keuangan tidak lagi melakukan *ex-ante check* dalam pembayaran anggaran kementerian teknis. Masih adanya isu kapasitas dan tata kelola dalam keuangan negara dapat menjadi alasan belum diberikannya fleksibilitas penuh atas pembayaran anggaran bagi kementerian negara/ lembaga.

Di negara-negara maju, *ex-ante check* Kementerian Keuangan telah digantikan dengan *ex-post accountability*. Sebagai contoh, di Belanda, setelah hukum anggaran ditetapkan dan dilaksanakan, tidak ada keterlibatan Kementerian Keuangan dalam proses pembayaran. Kementerian Keuangan akan terlibat jika ada permasalahan serius yang terdeteksi dalam pertanggungjawaban keuangan kementerian lini.

Model mana yang ideal diterapkan di Indonesia perlu mempertimbangkan 'teori konteks' yang mengusung ide bahwa sejatinya tidak ada sistem keuangan dan perbendaharaan yang ideal. Sebab, konteks spesifik seperti konteks politik, administrasi, dan hukum suatu negara menjadi determinan model mana yang ideal atau optimal.

Untuk itu, disamping analisis substansi fungsi perbendaharaan, hal yang tidak kalah penting adalah analisis atas konteks yang komprehensif untuk mencari bentuk dan format ideal sistem perbendaharaan di Indonesia.

Percepat Proses, Pagu Kontrak Tahun Jamak Ditambah

Riviu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.01/2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan

Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas dari kabinet kerja. Jalan tol, jembatan, pelabuhan, bandara, bendungan, dan infrastruktur lain banyak dibangun akhir-akhir ini. Beberapa proyek besar yang dikerjakan antara lain Pembangunan Bandara Sukabumi, Pelabuhan Patimban Subang, Double Track Kereta Api Sukabumi, Jalan Tol Bocimi dan terbaru bandara Kertajati. Berbagai infrastruktur menjadi prioritas untuk memudahkan akses antar daerah dan meningkatkan perekonomian.

Dalam prosesnya, pembangunan infrastruktur sering kali memerlukan waktu lebih dari satu tahun. Proses perencanaan hingga penyelesaian proyeknya memerlukan waktu melebihi satu tahun anggaran dengan biaya yang tidak sedikit. Untuk menjaga *governance* pengadaan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang melebihi satu tahun anggaran (tahun jamak), diperlukan aturan teknis bagi Kementerian/Lembaga pengguna anggaran.

Sebagai pedoman bagi Menteri/Pimpinan Lembaga/Pengguna anggaran dalam mengajukan permohonan persetujuan kontrak tahun jamak dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, Menteri Keuangan (Menkeu) telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan

(PMK) Nomor 60/PMK.02/2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan. Aturan ini ditetapkan sebagai aturan teknis dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai pengganti Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015.

Batasan Kewenangan Naik

PMK Nomor 60/PMK.02/2018 mengatur pekerjaan dengan kontrak tahun jamak untuk pekerjaan yang penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan paling lama tiga tahun anggaran. Termasuk dalam pengaturan ini adalah kontrak yang kurang dari dua belas bulan, tetapi melebihi satu tahun anggaran. Jenis pekerjaan yang dapat dilakukan dalam kontrak tahun jamak yang diatur dalam PMK Nomor 60/PMK.02/2018 terkait pekerjaan konstruksi dan pekerjaan nonkonstruksi.

Agar bisa dilaksanakan, terdapat pembagian kewenangan persetujuan pekerjaan kontrak tahun jamak, yaitu persetujuan dari Menteri/Pemimpin Lembaga/Pengguna Anggaran dan

persetujuan dari Menkeu. Persetujuan dari Menteri/Pimpinan Lembaga/Pengguna Anggaran diberikan untuk pekerjaan konstruksi dengan nilai sampai dengan Rp200 miliar, dan pekerjaan nonkonstruksi dengan nilai sampai dengan nilai Rp20 miliar. Adapun pekerjaan konstruksi dengan nilai di atas Rp200 miliar dan pekerjaan nonkonstruksi dengan nilai di atas Rp20 miliar, harus mendapatkan persetujuan oleh Menkeu. Ketentuan ini mengubah batasan nilai rupiah untuk persetujuan Menteri terkait atau Menkeu.

Dalam aturan sebelumnya yaitu PMK Nomor 238/PMK.02/2015, batasan Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan untuk menyetujui kontrak tahun jamak adalah sebesar Rp10 miliar bagi kegiatan penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis darat/laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, makanan untuk narapidana di Lembaga Pemasyarakatan pengadaan pita cukai, pelayanan pembuangan sampah, dan pengadaan jasa *cleaning service*.

Selain pekerjaan tersebut, pekerjaan tahun jamak dengan nilai di bawah Rp10 miliar dan pekerjaan dengan pagu di atas Rp10 miliar harus mendapatkan persetujuan Menkeu. Penambahan kewenangan persetujuan pagu anggaran kontrak tahun jamak oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Pengguna Anggaran

dimaksudkan untuk mempercepat dan memperlancar pencapaian program pemerintah pada Kementerian/lembaga terkait dengan tetap mengedepankan prinsip tata kelola pemerintah yang baik. Ketentuan batasan kewenangan untuk kontrak tahun jamak tidak berlaku bagi proyek yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dengan pinjaman/hibah luar negeri dan/atau pinjaman/hibah dalam negeri.

Proses Persetujuan

Menkeu akan memberikan persetujuan kontrak tahun jamak apabila telah ada surat tertulis oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Pengguna Anggaran dengan melampirkan beberapa persyaratan. Berdasarkan ketentuan pasal 5 PMK Nomor 60/PMK.02/2018, Menteri terkait harus menyampaikan hasil penilaian/rekomendasi dari instansi pemerintah atau tim teknis fungsional terkait kelayakan teknis bagi pekerjaan konstruksi di dalam negeri. Untuk pekerjaan konstruksi di luar negeri, persyaratan kelayakan teknis diberikan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan negara setempat. Selain surat rekomendasi kelayakan teknis, dalam

surat juga dinyatakan bahwa pekerjaan tersebut harus sudah dialokasikan dalam anggaran Kementerian/Lembaga atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kementerian/lembaga yang bersangkutan. Dokumen lain yang diperlukan adalah adanya rencana pelaksanaan tahun pekerjaan yang dicantumkan dalam prakiraan maju dan alasan pengajuan kontrak tahun jamak dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen pendukungnya.

Pemrosesan persetujuan kontrak tahun jamak yang diberikan oleh Menkeu dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), DJA meneliti dan meriviu dokumen permohonan persetujuan kontrak tahun jamak. Atas dokumen yang diajukan, DJA berhak untuk menerima atau menolak permohonan. Proses penyelesaian permohonan persetujuan kontrak tahun jamak dilakukan dengan jangka waktu paling lama tujuh hari kerja sejak riviu selesai dilakukan dan dokumen pendukung telah lengkap.

Selain memproses dokumen persetujuan kontrak tahun jamak, DJA juga menerima laporan perkembangan kegiatan dan anggaran tahun sebelumnya, serta rencana kegiatan dan anggaran tahun

yang akan datang terhadap kegiatan yang diberikan persetujuan tahun jamak.

Penutup

Penambahan kewenangan persetujuan anggaran atas kontrak tahun jamak diharapkan dapat mempercepat proses pembangunan berbagai infrastruktur yang menjadi salah satu program strategis kabinet kerja untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.

Perlu diperhatikan bahwa kewenangan Menkeu adalah dalam hal persetujuan anggaran dan jangka waktu atas kontrak tahun jamak. Terkait kebenaran formil dan materiil terkait dengan permohonan persetujuan kontrak tahun jamak, yang bertanggung jawab adalah Menteri/Pimpinan Lembaga/Pengguna Anggaran terkait. Persetujuan Menkeu juga bukanlah pengakuan atau pengesahan atas kebenaran dan keabsahan atas proses pengadaan barang/jasa, penunjukan pemenang penyedia barang/jasa, dan kontrak yang dibuat oleh Kementerian negara/lembaga terhadap pekerjaan yang telah dikontrakkan secara tahun jamak.

Teks Budi Sulistyono



Pembangunan infrastruktur sering kali memerlukan waktu lebih dari satu tahun

Foto:
Dok. Biro KLI

Menebar Buku Hingga Penjuru

Bocah seusia SD itu menggelar tikar di depan rumah. Buku-buku yang sebelumnya disiapkan sudah ditata rapi bak pedagang pasar membuka lapak. Bahkan sebagian diikat menggunakan tali kemudian digantung di pagar rumah. Mirip etalase di toko buku. Tak lama, beberapa peminat pun menghampiri 'lapaknya'. Bocah kecil itu pun tersenyum bahagia.

Masa kecil Fakhri Julverdie tak lepas dari buku dan permainan tradisional bersama teman sebaya. Lahir di Jakarta pada 19 Mei 1975, Fakhri menghabiskan masa kecil di Salemba Jakarta Pusat kemudian berpindah ke kawasan Kapuk Jakarta Barat. Di awal tahun 1980-an, Fakhri menikmati hari-hari menyenangkan dengan bermain di sawah, menangkap belut, dan bermain bersama kerbau. Betapa langka kegiatan tersebut dilakukan di Jakarta masa kini.

Agar bisa membeli buku-buku kesukaannya, Fakhri harus menyisihkan sebagian uang jajan. Komik Petruk dan Gareng karya Tatang Suhendra adalah salah satu favoritnya. Selain sering menyewakan buku-buku untuk mendapatkan tambahan uang jajan, Fakhri juga berjualan koran. Selama tinggal di Jakarta, Fakhri mengenyam pendidikan di SMP Negeri 82 Jakarta dan

SMA Negeri 96 Jakarta. Selepas SMA, Fakhri mantap melanjutkan kuliah di perguruan tinggi kedinasan. Pria yang gemar beraktivitas di luar ruang ini sempat mendaftar di Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia di Curug Tangerang dan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN).

Pada tahun 1993, Fakhri akhirnya diterima di STAN jurusan Anggaran. Ia pun bergabung dengan organisasi pecinta alam STAN bernama STAPALA. Sebagai anggota STAPALA, Fakhri menikmati seluruh kegiatan di luar rutinitasnya sebagai mahasiswa, seperti naik gunung, kegiatan solidaritas tanggap bencana, dan kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya.

Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Sumbawa Besar menjadi tempat penugasan pertama Fakhri pada tahun 1996. Di pelosok timur Indonesia tersebut, Fakhri tak susah untuk menyesuaikan diri. "Paling sedih kalau sedang tidak ada sinyal," ujarnya sembari tertawa. Untuk mengurangi kejenuhan saat bekerja, Fakhri berinisiatif mencari berbagai kegiatan, seperti membantu rekannya di tempat sablon percetakan, menjadi penjaga warnet, dan sebagainya.

Pria yang juga akrab disapa Kakak Ai ini mendapat penugasan di Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara pada tahun 2002. Setelah kembali ke Jakarta, Fakhri semakin sering menyalurkan hobi beraktivitas di luar ruang. Saat mengunjungi pantai Sawarna di Provinsi Banten bersama sejumlah rekan, tercetuslah ide untuk membuat sebuah kegiatan sosial.



Perjuangan menuju lokasi

Salah satu bentuk kegiatan sosial

Foto dok. pribadi

Gerakan literasi tanpa batas

Di bawah naungan komunitas 1 Nusa 1 Bangsa 1 Bahasa 1 Bumi, Fakhri membangun sebuah rumah baca di Sawarna pada tahun 2003. Selain rumah baca, anak-anak juga dikenalkan dengan kegiatan sains luar ruang yang didukung oleh beberapa relawan mahasiswa. Buku-buku yang diberikan tidak hanya ditujukan untuk anak-anak, namun juga buku-buku pengetahuan populer untuk dewasa. Buku pengetahuan tersebut ber-genre pertanian, peternakan, agama, gaya hidup, dan sebagainya.

Komunitas 1 Nusa 1 Bangsa 1 Bahasa 1 Bumi atau biasa disingkat 1N3B adalah gerakan pendidikan sains dan melek buku untuk kawasan terpencil di Indonesia. Walaupun awal kegiatan literasi komunitas ini sejak tahun 2005, namun secara resmi penggunaan brand 1N3B yaitu pada saat kegiatan 'Bagi Buku Bagi Ilmu Bagi Anak Negeri' di Desa Madobag, Kepulauan Mentawai pada tahun 2007. Semangat yang mendasari gerakan ini

yaitu pendidikan semestinya bebas sekat geografis, suku, agama, ras dan golongan sosial, dengan menysasar kawasan terpencil di Indonesia.

Selain pengembangan rumah baca, Komunitas 1N3B juga menyelenggarakan berbagai kegiatan positif bagi anak-anak dan masyarakat setempat. Kegiatan tersebut antara lain pengenalan kegiatan sains luar ruang kepada anak sekolah dasar, pemutaran film anak-anak untuk menumbuhkan motivasi dan cita-cita, pengenalan fotografi bagi anak, serta kegiatan mendongeng.

Beberapa lokasi yang pernah didatangi oleh Komunitas 1N3B antara lain Desa Madobag Pulau Siberut Kabupaten Kepulauan Mentawai (2009), Desa Ngadulanggi Kabupaten Sumba Timur (2010), Desa Sungai Lisai yang berada di dalam kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (2011), Desa Mataso Kabupaten Putussibau Kalimantan Barat (2015), Desa Tomalehu Barat Kabupaten Seram Bagian Barat (2017), serta Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta bekerja sama dengan Sekolah Pagesangan (Mei 2018).

Jalan yang tak mudah

Segala bentuk tantangan dalam menyelenggarakan kegiatan sosial ini tak membuat semangat Fakhri surut. Di sisi lain, fokus kegiatan komunitas 1N3B pada sejumlah lokasi yang sulit dijangkau tidak lepas dari anggapan negatif masyarakat. Sekilas kegiatan yang dilakukan komunitas ini tampak seperti jalan-jalan dan buang-buang uang saja. Namun, ada proses panjang dan melelahkan dibalikinya. Mulai dari penjajakan lokasi tujuan, melakukan komunikasi dengan narahubung di lokasi yang memiliki keterbatasan sinyal telepon genggam, pencarian dana, sampai pada proses pengelolaan buku-buku dan perlengkapan pendidikan yang akan dikirim ke lokasi. Proses persiapan ini kerap membutuhkan waktu 3-6 bulan sebelum pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Pria yang kini bertugas sebagai Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan ini akan terus menggelorakan gerakan literasi di berbagai penjuru Indonesia. Tujuannya adalah untuk menjembatani anak-anak di pelosok daerah mendapatkan akses pendidikan yang sama.

Saat ditanya impian ke depan, Fakhri mengaku ingin mendirikan perpustakaan kejujuran di berbagai tempat umum, seperti terminal dan stasiun. Pengguna perpustakaan tersebut diharapkan dapat melakukan pelayanan mandiri, baik meminjam dan mengembalikan buku. Ada satu kutipan RA. Kartini yang menjadi inspirasi dan semangat Fakhri, "Berilah aku pendidikan, maka kami akan bangkit sebagai bangsa yang mempunyai cita-cita," ujar pemburu buku murah di situs www.abebooks.com ini sembari tersenyum.

Teks Pradany hayyu

Kegiatan mengajar di alam terbuka

Foto dok. pribadi





Menjemput Sukses dengan Passion

“Love what you do and do what you love. Don't listen to anyone else who tells you not to do it. You do what you want, what you love. Imagination should be the center of your life” -- Ray Bradbury.

Semasa kecil, Zara bercita-cita menjadi dokter. Namun, kenyataan berkata lain. Alih-alih berprofesi sebagai dokter, kini ia bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Perlu waktu baginya untuk menyadari bahwa kehendak Tuhan adalah yang terbaik. Berprofesi sebagai ASN merupakan nikmat tersendiri, sehingga ia bisa belajar akan banyak hal. Setelah sekian lama bekerja, ia pun menemukan *passion* menulis. Melalui tulisan, ia dapat mendukung organisasi tempatnya bekerja guna meningkatkan kepercayaan publik (*public trust*) atas kinerja organisasinya selama ini.

Ilustrasi di atas adalah tentang bagaimana seseorang bisa menemukan *passion* pada profesi yang sedang dijalannya. Pertanyaan selanjutnya, benarkah *passion* mampu menjadi lentera hidup? Patutkah hal tersebut diperjuangkan?

Hidup tanpa *passion* layaknya bekerja selama 8 jam sehari, atau 40 jam seminggu, dengan tanpa disertai semangat dan sekadar mengejar materi. Padahal, setiap jiwa memiliki *passion*. Tidak banyak yang menyadari, *passion* sesungguhnya telah ada sejak manusia dilahirkan.

Lebih dari sekedar hobi, *passion* menjelma menjadi sebuah keinginan mendalam dari lubuk hati. Ia dilakukan tanpa paksaan ataupun beban. Sulit memang menemukan *passion*. Namun, apabila kita telah menemukannya, justru tanpa disadari hal itu membuat kita sulit untuk menghentikannya.

Dalam teori Johari Window dikenal istilah wilayah terbuka (*open self*). Semakin efektif apabila ada saling keterbukaan terhadap diri maupun orang lain. Pada wilayah ini, seseorang akan terbuka mengenai sifat, perasaan, kesadaran, perilaku, dan motivasi. *Passion* akan mudah dikenali apabila kita memperluas wilayah ini dengan aktif bersosialisasi, bergabung dalam komunitas sehat, *open-minded*, terbuka terhadap kritik, serta rajin menempa diri dengan kegiatan positif.

Tak dapat dipungkiri, meraih sukses memerlukan *skill and knowledge*, serta *passion and planning*. Dengan bekerja, kita mempertajam *skill and knowledge*. Dengan mencintai sebuah pekerjaan, secara tidak langsung hal ini menuntun kita untuk menemukan *passion* yang mampu menjadi motor penggerak kesuksesan. Meraih sukses juga tak luput dari sebuah perencanaan (*planning*) yang baik. Seperti *quote* yang disampaikan Benjamin Franklin, “if we fail to plan, we are planning to fail!” Artinya, jika kita gagal merencanakan, kita merencanakan kegagalan.

Saat kita memiliki *passion* yang beriringan dengan pekerjaan kita, maka teruslah berjuang bersamanya untuk menggapai kesuksesan. Sebaliknya, bila kita belum menemukannya, jangan menyerah. Cobalah untuk menjejaki kembali potensi diri. Yakinlah bahwa Tuhan akan menunjukkan jalan terbaik bagi hamba-Nya yang mau berusaha. *Let's find our passion and achieve more success.*

Teks Lutfiana Nadzroh



Kulari ke Pantai: Road Trip Ala Anak-anak

Judul: Kulari Ke Pantai
Sutradara: Riri Riza
Penulis Naskah: Gina S. Noer, Mira Lesmana, Riri Riza, dan Arie Kriting
Tahun: 2018
Foto: IMDB.com

Setelah film *superhero* dan percintaan remaja menjamur di bioskop tanah air belakangan ini, film “Kulari Ke Pantai” hadir memenuhi hasrat masyarakat akan film Indonesia bertema anak-anak yang telah lama absen di layar lebar. “Kulari Ke Pantai” adalah film anak-anak bergaya *road movie* dari sutradara Riri Riza dan produser Mira Lesmana: dua *filmmaker* ternama di kancah perfilman Indonesia berkat karya-karyanya yang laris dan berkualitas. Untuk film anak-anak sendiri, keduanya pernah sukses menghadirkan film-film legendaris seperti “Petualangan Sherina” dan “Laskar Pelangi”. Oleh karena itu, tak salah jika kita akan berekspektasi tinggi untuk “Kulari Ke Pantai”.

“Kulari Ke Pantai” berfokus pada dua karakter anak perempuan bernama Sam (diperankan oleh Maisha Kanna) dan Happy (diperankan oleh Lil'li Latisha). Keduanya adalah saudara sepupu yang memiliki karakter yang bertolak belakang; Sam adalah anak asal Nusa Tenggara yang mencintai pantai, sementara Happy adalah tipikal anak Jakarta yang sehari-hari erat dengan *gadget*. Bersama Uci, ibunda Sam (diperankan oleh Marsha Timothy), keduanya dibawa ke suatu perjalanan darat dari Jakarta menuju Pantai G-Land di Banyuwangi. Dalam perjalanan inilah Sam dan Happy merekatkan kembali tali persaudaraan di antara mereka.

Plot “Kulari Ke Pantai” mungkin terkesan santai dan sederhana. Permasalahan-permasalahan yang timbul adalah permasalahan-permasalahan yang mudah terselesaikan dan tidak meledak-ledak, layaknya konflik anak-anak pada umumnya. Jika tadi saya menyebutkan “Petualangan Sherina” dan “Laskar Pelangi” sebagai film anak-anak yang sukses karya duet Riri Riza-Mira Lesmana, “Kulari Ke Pantai” ini akan terlihat inferior karena ia tidak memiliki tema inspiratif (seperti tema pendidikan

dalam “Laskar Pelangi”) atau konflik besar (seperti konflik penculikan dalam “Petualangan Sherina”).

Namun, bukan berarti “Kulari Ke Pantai” tidak spesial. Sebagaimana *road movie* pada umumnya, “Kulari Ke Pantai” berusaha memotret dinamika karakterisasi tokoh-tokohnya yang terjadi sampai dengan berakhirnya perjalanan. Dan saya kira ini telah berhasil dilakukan, berkat naskah yang menghibur, mengundang tawa, dan menyimpan komentar sosial tentang kehidupan anak-anak di era digital ini. Maisha Kanna dan Lil'li Latisha tampil dengan natural, sementara karakter-karakter pendukung seperti yang dimainkan oleh Dodit Mulyanto dan Ligwina Hananto mampu meramaikan cerita. Ditambah pemandangan indah separuh pulau Jawa yang terekam kamera, serta lagu tema nan menyenangkan dari grup musik RAN, “Kulari Ke Pantai” menjadikan momen libur sekolah sebagai waktu yang tepat untuk mengajak anak-anak ke bioskop sekaligus mengajari mereka mencintai film-film karya bangsa sendiri.

Peresensi: Akbar Saputra

Daya Pikat Sendang Pinilih

Kabupaten Wonogiri sudah lama dikenal dengan keberadaan Waduk Gajah Mungkur. Danau buatan yang berada di sebelah barat Gunung Gajah Mungkur ini dibuat dengan membendung sungai Bengawan Solo. Namun, belum banyak yang tahu bahwa ada satu desa di dekatnya yang menarik untuk dikunjungi, bernama Desa Sendang Pinilih.

Watu Cenik

Memandang Waduk Gajah Mungkur dari tepian saja sudah menenangkan, apalagi jika dinikmati dari ketinggian. Rasa tersebut bisa kita dapatkan di sebuah bukit batu bernama Watu Cenik, sebuah destinasi wisata di Sendang Pinilih. Dalam bahasa lokal, *watu* berarti batu dan *nyenik* berarti duduk. Artinya, terdapat dua buah batu besar yang terlihat seperti sedang duduk di tepi lereng bukit.

Begitu sampai di sini, saya langsung disuguhi panorama alam pegunungan yang asri. Perairan di sekelilingnya membentang luas dan memanjakan mata. Rasa penat dan jenuh seketika terbang, terbawa hembusan angin.

Watu Cenik berada pada ketinggian sekitar 400 m di atas permukaan laut. Sebenarnya jaraknya sangat dekat dari jalan raya, hanya 1,5 km. Namun, lokasinya cukup tersembunyi. Untuk mencapai ke sana, pengunjung harus melewati

tanjakan terjal dengan kemiringan kurang lebih 45 derajat. Sebab itu, pastikan kendaraan yang dikendarai dalam keadaan yang prima dan perhatikan baik-baik rambu di sisi jalan.

Pada pertengahan tahun 70-an, kawasan ini sempat digunakan untuk landasan luncur gantole. Saat itu, waduk baru akan dibangun. Lokasi sekitar masih merupakan persawahan. Pada pertengahan tahun 80-an para pengguna landasan ini menemukan bukit yang lebih tinggi yaitu Bukit Joglo. Praktis sejak saat itu, warga setempat hanya menggunakan lahan disekitar bukit untuk mencari rumput pakan ternak.

Tahun 2017 potensi wisata Watu Cenik kembali dikembangkan pemerintah desa. Kawasan ini kini jauh lebih terawat dan disulap menjadi semakin cantik. Landasan paralayang dan gantole yang semula lapuk kembali diperbaiki. Jika sedang tidak digunakan, landasan ini menjadi tempat bersantai dan bercengkrama kesukaan pengunjung.

Spot Foto

Pengelola juga nampaknya sadar bahwa para pengunjung di masa sekarang ini gemar berfoto. Untuk memanjakan mereka, sudah disediakan beberapa titik pengambilan gambar yang unik. Ada wahana balon udara yang tingginya 7 m dan lebarnya 3 m. Wahana ini diletakkan tepat di tepi bukit, sehingga orang yang naik ke balon udara tersebut terlihat seakan tengah terbang ke angkasa.

Ada juga titik foto lain berupa bingkai berbentuk hati tanda cinta, dengan latar belakang keindahan perairan waduk. Bagi yang datang dengan teman-teman atau keluarga, tentu seru berpose di sini beramai-ramai.

Usai berfoto, pengunjung bisa segera mengabarkan kepada dunia bahwa mereka tengah menikmati waktu di Watu Cenik. Sebab, pihak pengelola juga sudah menyediakan fasilitas WiFi yang bisa digunakan secara gratis. *Cekrek, upload!*



Berbagai tempat rekreasi di Sendang Pinilih

Wisata Murah

Sebenarnya, Desa Sendang Pinilih juga mengelola dua objek wisata lain yaitu Sako Gunung dan Puncak Joglo. Keduanya bukit ini berada tidak jauh dari Watu Cenik. Namun, karena keterbatasan waktu, saya belum sempat mengunjunginya.

Berekreasi di Desa Sendang Pinilih tergolong murah meriah. Untuk menjelajahi desa, pengunjung cukup membayar tiket masuk satu kali sebesar Rp4 ribu saja. Sementara, untuk biaya parkir di setiap objek wisata, cukup merogoh kocek Rp2 ribu. Sangat terjangkau bukan?

Teks dan foto Anas Nur Huda



Jessica Sudarta

Mimpi Manis Sang Harpis

Harpa bukan sekedar menjadi instrumen musik semata. Bagi dirinya, harpa sudah menjadi bagian dari hidupnya. Sambil berkisah, Jessica Sudarta, sang harpis, menceritakan asal mula ia mengenal harpa.

Melalui teman masa kecilnya, ia termotivasi untuk mengenal lebih jauh tentang harpa. Sempat kesulitan mencari sekolah musik saat itu di kotanya, orang tuanya pun memberikan dukungan penuh dengan menyekolahkan ke Jakarta. Berhasil belajar alat musik pertama piano hingga ke kancah internasional, harpa menjadi alat musik kedua yang ia tekuni. Seniman yang pernah sebanggung dengan Sarah Brightman itu juga mengaku harpa sangat personal.

“Kalau buat Jessica harpa itu sangat *intimate* ya. Alat musik yang sangat personal. Jadi kan memang kita cara memainkannya itu kan harus ditaruh di tubuh kita kemudian ketika kita memainkan kita juga bisa merasakan getaran dari apa yang kita mainkan,” ungkapnya.

Dari sini, kemampuannya semakin terasah. Ia pun berhasil mendapat penghargaan dalam berbagai ajang nasional dan internasional. Terakhir, ia berhasil mendapatkan Best Saint Saëns Performance di Amerika Serikat.

Perempuan yang menginjak dua puluh tahun ini juga memiliki mimpi khusus terhadap para generasi muda.

Ia berharap jalannya masih akan terus panjang dan bisa memberikan lebih

banyak kontribusi kepada negara dan mendorong semangat para anak muda untuk terus belajar, terutama dalam hal musik.

Untuk mewujudkan misi baiknya, Jessica pun menginisiasi gerakan ‘Love for Indonesia’. Dalam wadah ini ia membuat program Simfoni Surgawi Nusantara dimana ia dan teman-temannya mengajak anak-anak pra sejahtera yang memiliki keterbatasan terhadap akses pendidikan, terutama terkait dengan bidang seni dan musik. Program ini ditempuh dengan membuat *camp-camp* kecil dan pembelajaran khusus yang ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan kepercayaan diri mereka.

“Terkadang karena mereka hidup di daerah pra sejahtera, mereka merasa kecil. Mereka merasa tidak dianggap atau mereka merasa tidak mampu. Namun dengan adanya *camp-camp* ini mereka mendapatkan perhatian yang lebih. Mereka mendapatkan pengajaran-pengajaran yang mereka tidak pernah tahu sehingga mereka bisa mempunyai *self confidence*,” harapnya.

Ditanya tentang pentingnya warga negara turut membayar pajak, Jessica menuturkan bahwa tertib dalam hal kecil seperti membayar pajak akan turut menentukan perilaku tertib dalam aspek kehidupan yang lainnya.

“Seperti pengelolaan uang pajak yang kita bayar itu untuk apa, kita sebaiknya sebagai warga negara itu *aware*. Kita harusnya sadar kita perhatian dengan hal-hal seperti itu. Jangan sampai kita tidak perhatian kemudian ketika ada salah penggunaan kita protes kita marah-marah. Kan itu sebenarnya salah kita sendiri karena kita tidak dari awal tertib membayar pajak,” ujarnya.

Teks Abdul Aziz

Mas Praim

Cerita : Dimach Putra

Gambar : Bimo Adi





KERJA KITA
PRESTASI BERSAMA
DIRGAHAYU KE-73
REPUBLIK INDONESIA

Foto
Anas Nur Huda



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA